IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN SARANA PRASARANA SEKOLAH

DALAM MENUNJANG PEMBELAJARAN SISWA

(STUDI PADA SMP NEGERI 3 KEPANJEN KABUPATEN MALANG)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian SarjanaPada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

> SHINTA ANJANI TRISNA 155030900111009



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PRODI ADMINISTRASI PENDIDIKAN
MALANG
2019

MOTTO

"You Can if You think You can, You can't if You Think You Can't, so do everything you want and believe if you can do it"



BRAWIJAYA

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul

: Implementasi Kebijakan Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Sekolah Dalam Menunjang Pembelajaran Siswa (studi di

SMPN 3 Kepanjen)

Disusun Oleh

: Shinta Anjani Trisna

NIM

: 155030900111009

Fakultas

: Ilmu Administrasi

Jurusan

: Administrasi Publik

Konsentrasi

: Administrasi Pendidikan

Malang, 9 Juli 2019

Komisi Pembimbing

Ketua

Dr.Drs.Fadillah Amin, M.AP.,Ph.D

NIP. 196012052005011003

Anggota

Andhyka Muttaqin, S.AP.,MPA

NIP. 19870426 201504 1 001

BRAWIJAYA

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)

Malang, 09 Juli 2019

Shinta Anjani Trisna

BRAWIJAY

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari

: Kamis

Tanggal

: 29 Agustus 2019

Waktu

: 11.00 - 12.00 WIB

Skripsi Atas Nama

: Shinta Anjani Trisna

Judul

: Implementasi Kebijakan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah dalam menunjan Pembelajaran Siswa (Studi di

SMPN 3 Kepanjen Kabupaten Malang)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D

NIP. 196912052005011003

Anggota

Andhyka Muttaqin, S.AP.,MPA

NIP. 201107078512141001

Anggota

Anggota

Dr. Mohammad Nuh, S,IP., M.Si

NIP. 19708282006041001

Dr. Moh Said., S.Sos., M.A NIP. 197806302008121003

RINGKASAN

Shinta Anjani Trisna, 2019, **Implementasi Kebijakan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah Dalam Menunjang Pembelajaran Siswa(Studi di SMPN 3 Kepanjen),** Dr.Drs.Fadillah Amin, M.AP.,Ph.D, selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Andhyka Muttaqin, S.AP.,MPA selaku anggota Komisi Pembimbing.

Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah adalah, upaya yang dilakukan sekolah untuk memenuhi, sarana parsana sekolah sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menunjang pembelajaran siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi kebijakan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah di SMP 3 Kepanjen serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat apa saja yang dihadapi sekolah dalam menerapkan implementasi kebijakan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah dalam menunjang pembelajaran siswa.

Proses penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2019 yang berlokasi di Kepanjen Kabupaten Malang dengan siklus penelitian di SMPN 3 Kepanjen. Indikator indikator sekolah yang diteliti yaitu prosedur yang dilakukan SMP 3 Kepanjen dalam pemenuhan sarana dan prasarana sekolah, aktor pelaksana dan penerima dalam pemenuhan sarana dan prasarana sekolah, kesesuaian pemenuhan sarana dan prasarana sekolah dengan Permendiknas No 24 Tahun 2007, pemenuhan sarana dan prasarana sekolah dalam menunjang pembelajaran siswa.

Hasil penelitian bahwa dalam implementasi Kebijakan Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah dalam menunjang pembelajaran siswa di SMPN 3 Kepanjen yaitu SMPN 3 Kepanjen dalam pemenuhan sarana dan prasarana menggunakan prosedur-prosedur yang sudah Perencanaan,pengadaan,Inventarisasi,Pemeliharaan,dan Penghapusan sarana dan prasarana sekolah. SMPN 3 Kepanjen.Siswa di SMPN 3 Kepanjen juga menuturkan jika sarana dan prasarana sangat mempengaruhi mereka dalam proses pembelajaran sehingga menurut mereka sangat penting agar sarana dan prasarana sekolah di SMPN 3 Kepanjin menjaga agar sarana dan prasarana sekolah tetap baik. Penulis merumuskan saran sebagai berikut: ada beberapa sarana dan prasarana sekolah yang belum begitu terawat sebaiknya dioptimalkan dalam pemeliharanya tidak fokus pada sarana prasarana sekolah yang baru, siswa juga ikut serta merawat sarana dan prasarana sekolah yang sudah ada , sehingga dengan adanya pemeliharaan dari tim sarana prasarana sekolah serta dari siswa, sarana prasarana sekolah akan awet dan tidak mudah rusak, dan yang terakhir tim

sarana dan prasarana dapat menggunakan teori-teori implemtasi yang ada agar implementasi kebijakan dalam pemenuhan sarana dan prasarana sekolah dapat terstruktur dan mengerti dengan jelas langka apa yang akan dilakukan.



SUMMARY

Shinta Anjani Trisna, 2019, Fulfilment Implementation Policy of facilities and infrastructure to improve students' learning; a case study in SMPN 3 Kepanjen Malang Regency, Dr. Drs.Fadillah Amin, M.AP., Ph.D, as Chair of the Supervisory Commission and Andhyka Muttaqin, S.AP., MPA as a member of the Supervisory Commission.

Fulfillment of school facilities and infrastructure is the efforts made by the school to fulfill, school facilities in accordance with the standards set by the government that aim to support student learning. This study aims to determine the implementation of school facilities and infrastructure fulfillment policies at SMP 3 Kepanjen and to know what supporting and inhibiting factors the school faces in implementing the implementation of school facilities and infrastructure policies in supporting student learning.

The process of this research, the author uses a type of descriptive research using a qualitative approach. This research was conducted in May 2019 which is located in Kepanjen Malang Regency with a research cycle at Kepanjen Junior High School 3. The school indicator indicators studied were the procedures performed by Junior High School 3 in the fulfillment of school facilities and infrastructure, implementing actors and recipients in the fulfillment of school facilities and infrastructure with Permendiknas No. 24 of 2007, fulfillment of school facilities and infrastructure in supporting student learning

The results of the study that in the implementation of the Policy for Fulfilling school facilities and infrastructure in supporting the learning of students at Kepanjen Junior High School 3, namely SMP 3 Kepanjen in fulfilling school facilities and infrastructure using existing procedures such as, Planning, procurement, Inventory, Maintenance and Removal of facilities and school infrastructure. Kepanjen Junior High School 3. Students at Kepanjen Junior High School 3 also said that the facilities and infrastructure greatly influenced them in the learning process so that according to them it was very important that school facilities and infrastructure at the National Junior High School 3 maintain good school facilities and infrastructure. The author formulates the following suggestions: there are a number of school facilities and infrastructure that have not been properly maintained should be optimized in the maintenance not focusing on new school infrastructure, students also take care of existing school facilities and infrastructure, so that with maintenance from the infrastructure facilities schools and students, school infrastructure will be durable and not easily damaged, and the last facility and infrastructure team can use existing implementation theories so

that policy implementation in meeting school facilities and infrastructure can be structured and clearly understand what is rare to do.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah dalam Menunjang Pembelajaran Sekolah (Studi Pada SMPN 3 Kepanjen)

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Pendidikan Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

- Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
- Bapak Fadillah Amin, Dr.M.AP.,Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
- Bapak Hermawan, Dr.S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
- 4. Bapak Fadillah Amin, Dr.M.AP.,Ph.D selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan bimbingan skripsi ini, hingga dapat terselesaikan dengan baik. Serta nasihat yang sangat berarti dalam perbaikan skripsi ini

- 5. Bapak Andhyka Muttaqin S.AP.,MPA selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta memberikan masukan agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi
- Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Administrasi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama menempuh studi di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
- 7. Kedua Orang Tua yang telah mendukung penulis dalam skripsi ini
- 8. Seluruh Bapak Ibu Guru dan para staff SMP Negeri 3 Kepanjen yang telah membantu penulis dalam penelitian di lapangan
- 9. Yohanes Rendra Ardi Kristian atas segala dukungan dan bantuan selama mengerjakan skripsi ini.
- 10. Teman-teman seperjuangan Administrasi Pendidikan angkatan 2015 atas segala dukungan dan bantuan selama pengerjaan skripsi.
- 11. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini

Semoga segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan dari Tuhan YME .Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca untuk menambah wawasan dan pengentahuan.

Malang,

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	XV
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3Tujuan Penelitian	8
1.4Kontribusi Penelitian	9
1.5 Sistematika Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Kebijakan	12
2.1.1 Pengertian Kebijakan	12
2.1.2 Tujuan Kebijakan	13

2.1.3	Kebijakan Publik13			
2.1.4	Tahap-tahap Kebijakan Publik14			
2.2 Implementasi Kebijakan Publik17				
2.2.1	Pengertian Implementasi Kebijakan17			
2.2.2	Langkah-langkah Implementasi Kebijakan20			
2.2.3	Model-Model Implementasi Kebijakan22			
2.2.4	Faktor Implementasi Kebijakan26			
2.3 Kebijakan	Publik Dalam Pendidikan31			
2.4 Sarana da	n Prasarana Pendidikan35			
2.4.1	Pengertian Sarana dan Prasarana Pendidikan35			
2.4.2	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan38			
2.4.3	Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan39			
	Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pendidikan44			
2.5 .Pembelaj	aran45			
2.5.1	Pengertian Pembelajaran45			
2.5.2	Perencanaan Pembelajaran46			
2.5.3	Pelaksanaan Pembelajaran47			
2.5.4	Tujuan Pembelajaran47			
2.4.5	Media Pembellajaran48			
2.6 Sarana dan Pr	asarana Pendidikan untuk menunjang pembelajaran.50			
DAR HI METODE	DENICH WILL ALL			
BAB III ME I ODE	PENELITIAN51			
3.1 Jenis P	enelitian51			
3.2 Fokus l	Penelitian52			
3.3 Lokasi	dan Situs Penelitian53			
3.4 Jenis &	Sumber Data54			
3.5 Teknik	Pengumpulan Data55			
3.6 Instrum	nen Penelitian57			
3.7 Keabsa	han Data58			
3.8 Analisi	s Data61			

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN64
4.1 Gambaran Umum dan lokasi penelitian64
4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Malang64
4.1.2 Arti Lambang Kabupaten Malang66
4.1.3 Kondisi Geografis Kabupaten Malang68
4.1.4 Kondisi Demografis Kabupaten Malang72
4.1.5 Kondisi Pendidikan Kabupaten Malang72
4.2 Sejarah Berdirinya SMP Negeri 3 Kepanjen77
4.2.1 Visi dan Misi SMP Negeri 3 Kepanjen78
4.2.2 Tujuan SMP Negeri 3 Kepanjen79
4.2.3 Struktur Organisasi Bagaian Sarana dan prasarana SMP
Negeri 3 Kepanjen80
4.3 Penyajian Data dan Fokus Penelitian81
4.3.1 Implementasi Kebijakan Pemenuhan Sarana dan
Prasarana di SMP Negeri 3 Kepanjen81
1) Prosedur pemenuhan sarana dan prasarana di SMP
Negeri 3 Kepanjen81
2) Aktor Pelaksana93
3) Kesesuaian pemenuhan sarana dan prasarana di
SMP Negeri 3 Kepanjen berdasarkan
Permendiknas No 24 Tahun 200796
4) Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah dalam
menunjang pembelajaran siswa100

4.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat103
1) Faktor Pendukung103
2) Faktor Penghambat107
4.3.3 Analisis Data
4.3.3.1 Implementasi Kebijakan pemenuhan sarana dan
prasarana sekolah di SMP Negeri 3 Kepanjen111
1) Prosedur Pemenuhan sarana dan prasarana di SMP
Negeri 3 Kepanjen111
2) Aktor Pelaksana116
3) Kesesuaian dengan Permendiknas No 24 Tahun
2007117
4) Pemenuhan sarana dan prasarana dalam menunjang
pembelajaran siswa di SMP Negeri 3 Kepanjen120
4.3.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat121
1) Faktor Pendukung121
2) Faktor Penghambat
BAB V PENUTUP130
5.1 Kesimpulan
5.2 Saran
DAFTAR PUSTAKA141

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tahapan Kebijakan Publik	1
Gambar 2.2 Model Implementasi	21
Gambar 3.1 Komponen analisis data	63
Gambar 4.1 Lambang Kabupaten Malang	68
Gambar 4.2 Peta Kabupaten Malang	70
Gambar 4.4 Angka APS di Kabupaten Malang	77
Gambar 4.5 Rata-rata Lama sekolah di Kabupaten Malang	78
Gambar 4.6 Aplikasi pencatatan inventaris di SMP Negeri 3 Kepanjen	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Prosedur sarana dan prasarana dalam Permendiknas No 24 Tahun 200
5
Tabel 1.2 Standar Rasio Lahan untuk SMP/MTs
Tabel 1.3 Prasarana di SMP Negeri 3 Kepanjen
Tabel 4.1 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
Tabel 4.2 Jumlah sekolah dan Guru di Kabupaten Malang
Tabel 4.3 Struktur Organisasi Sarana dan Prasarana SMP Negeri 3 Kepanjen 83



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah proses upaya meningkatkan nilai peradaban individu atau masyarakat dari suatu keadaan tertentu menjadi suatu keadaan yang lebih baik, dan prosesnya melalui penelitian, pembahasan, atau merenungkan tentang masalah atau gejala-gejala perbuatan mendidik. Pendidikan merupakan hal terpenting sehingga tidak pernah terpisah dengan kehidupan manusia. Dengan adanya pendidikan dapat merubah suatu kehidupan manusia menjadi lebih baik, sebagai tempat untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas. (Neolaka 2017:14).

Sejalan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Sedangkan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkarakter pada nilai-nilai agama, nasional Indonesia, dan tanggapan terhadap tuntutan perubahan zaman. Pelaksanaan pendidikan nasional ini tentunya dengan dilakukannya proses pembelajaran sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 yang berbunyi,

"pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar" Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan program pendidikan dalam proses pembelajaran. Fasilitas sarana dan prasarana yang ada dalam suatu lembaga pendidikan merupakan salah satu bagian penting yang perlu diperhatikan. Pasalnya, keberadaan sarana dan prasarana ini akan menunjang kegiatan akademik dan non-akademik siswa serta mendukung terwujudnya proses belajar-mengajar yang kondusif. Keberadaan sarana dan prasarana tidak akan lama apabila tidak adanya perawatan dan pendayagunaan secara efektif dan efisien. (Ramayulis:2004).

Adanya kerusakan yang terjadi akibat dari ketidak pedulian sekolah terhadap perawatan fasilitas yang ada sehingga menjadikan buruknya sarana dan prasarana. Sikap acuh tak acuh dan tidak adanya pengawasan dari pemerintah, membuat banyak fasilitas yang ada tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, akibat kondisi yang banyak rusak, membuat para pelajar enggan menggunakannya (Kompas.com, 4 Febuari 2018). Hal ini terjadi karena tidak adanya kesadaran dari setiap guru, siswa dan pengurus sekolah untuk menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang ada.

Salah satu sumber masalah pendidikan tentang sarana dan prasarana yang sering terjadi ini karena kurangnya penerapan tentang pemenuhan sarana dan prasarana yang bertugas untuk mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendididkan melalui beberapa tahapan diantaranya yaitu pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan. (Ramayulis:2004:11)

Sarana dan Prasarana Sekolah harus memenuhi standar minimum, dalam hal ini dapat dilihat dari Permendiknas No.24 Tahun 2007 pasal 1 menyebutkan bahwa standar sarana dan prasarana untuk sekolah SD/MI,SMP/MT,SMA/MA mencakup kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana. Untuk menjamin terwujudnya kegiatan pembelajaran yang aktif,efektif,efisien dan menyenangkan. Diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai kriteria minimum yang harus dimiliki oleh sekolah formal baik dari SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA meliputi:

- 1. Ruang kelas
- 2. Ruang perpustakaan
- 3. Ruang laboraturium
- 4. Ruang komputer
- 5. Ruang tempat beribadah
- 6. Ruang pimpinan
- 7. Ruang guru
- 8. Ruang tata usaha
- 9. Ruang konseling
- 10. Ruang UKS
- 11. Ruang organisasi kesiswaan
- 12. Kamar mandi
- 13. Gudang
- 14. Ruang sirkulasi
- 15. Tempat bermain/olahraga

BRAWIJAY

Tabel 1.1 5 Prosedur Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah menurut Permendiknas No 24 Tahun 2007

NO	PROSEDUR PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA		
1	Menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan beserta fungsinya		
2	Mengklasifikasikan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan		
3	Penyusunan Proposal pemenuhan sarana dan Prasarana, untuk sekolah negeri proposalnya ditujukan kepada pemerintah melalui dinas, sedangkan untuk sekolah swasta proposalnya ditujukan untuk yayasan.		
4	Menerima peninjauan dari pihak yang dituju untuk menilai kelayakan sekolah memperoleh sarana dan prasarana		
5	Setalah ditinjau dan dikunjungi, sekolah akan menerima sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan.		

Sumber: Kemendikbud (2018)

Dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia memang sudah diatur dalam permendikans no 24 Tahun 2007 tentang standar apa saja yang harus dipenuhi bagi sekolah seperti, menganalisi, mengklasifikasi, menyusun prposal dan mengajukan proposal mengenai sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan , sehingga tidak asal dan serta merta dalam meminta bantuan sarana dan prasarana sekolah.

Untuk pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana sendiri khususnya untuk SMP memiliki standar sarana dan prasarana sendiri seperti luas bangunan, luas ruang kelas, kenyamanan kurdi dan meja bagi siswa, toilet, kantin, ruang guru,uks, laboraturium, lapangan dll. Standar-standar yang tertera dalam Permendiknas no 24 Tahun 2007 tersebut dimaksudkan untuk membuat kenyamanan siswa dalam pembelajaran, karena sarana dan prasarana sekolah menunjang untuk pembelajaran siswa baik indoor maupun outdoor. Karena terkadang jika sarana

prasarana kurang memenuhi, ada siswa yang langsung kehilangan mood untuk pembelajaran sehingga hal itu bisa mengakibatkan kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran akibat tidak terepenuhinya sarana dan prasarana sekolah.

Tabel 1.2, Standar Rasio minimum luas lahan SMP Terhadap Peserta Didik

No	Banyak Rombongan Belajar	Bangunan satu lantai	Bangunan Dua Lantai	Bangunan Tiga lantai
1	3orang	22,9 m2	<u>-</u>	-
2	4-6 orang	16,0 m2	8,5 m2	-
3	7-9 orang	13,8 m2	7,5 m2	5,1 m2
4	10-12 orang	12,8 m2	6,8 m2	4,7 m2
5	13-15 orang	12,2 m2	6,6 m2	4,5 m2
6	16-18 orang	11,9 m2	6,3 m2	4,3 m2
7	19-21 orang	11,6 m2	6,2 m2	4,3 m2
8	22-24 orang	11,4 m2	6,1 m2	4,3 m2

Sumber: Permendiknas no 24 Tahun 2007

Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa luas bangunan mempengaruhi jumlah peserta didik, sehingga lahan dalam sekolah sangat mempengaruhi terhadap pembangunan bangunan yang ada disekolah.

Kecamatan Kepanjen merupakan salah satu dari 33 kecamata yang ada di Kabupaten Malang. Tetapi untuk sarana dan prasarana sekolah masih menjadi kendala terbesar di Kabupaten Malang.Bupati Malang secara langsung menyampaikan evaluasi tersebut setelah upacara Hardiknas di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen. Selain adanya kekurangan guru, sarana dan prasarana

sekolahpun menjadi bagian dari kendala yang masih dihadapi pemerintahannya, menurutnya dunia pendidikan masih belum ideal misalnya dalam sarpras sekolahan yang masih terbilang terbatas, hal ini dikarenakan anggarannya juga yang terbatas. Ini menjadi salah satu evaluasi bagi pemerintahan pendidikan di Kabupaten Malang.

Kabupaten Malang sendiri tentunya dengan kecamatan berjumlah 33 kecamatan, memiliki 1.200 sekolah negeri untuk SD.SMP.SMA.maupun SMK dan 1.070 sekolah swasta untuk SD,SMP,SMA, maupun SMK. Dengan banyak jumlah sekolah tersebut tentu banyak anggaran yang dikeluarkan untuk memenhui kebutuhan sarana dan prasarana tiap sekolah,,ini merupakan kendala yang telah disampaikan sendiri oleh Bapak Rendra selaku Bupati Kabupaten Malang.Banyak sekolah didirikan serta persaingan yang semakin ketat antar sekolah untuk berlomba-lomba memberikan fasilitas serta pelayanan maksimal menjadikan sekolah harus mepertimbangkan bagaimana mengelola sarana dan prasarana pendidikan.

Pertimbangan banyak sekolah yang memberikan fasilitas yang lengkap berbeda dengan sekolah pada umumnya. Kecamatan Kepanjen sendiri memiliki sekolah SMP Negeri berjumlah 5 SMP Negeri yaitu SMP Negeri 1 Kepanjen dengan luas 12 m2, SMP Negeri 2 Kepanjen dengan luas 7.500 m2, SMP Negeri 3 Kepanjen dengan luas 18.500 m2, SMP Negeri 4 Kepanjen dengan luas 6.182 m2, dan SMP Negeri 5 Kepanjen dengan luas 7.360 m2 dan dari SMP Negeri tersebut untuk sarana dan prasarananya SMP Negeri 1,4,dan 5 sama karena memang luas tanah yang tidak sebesar SMPN 3 Kepanjen.

Maka peneliti tertarik mengambil lokasi penelitian SMPN 3 Kepanjen dikarenakan SMPN 3 Kepanjen memiliki banyak fasilitas yang lengkap walaupun sekolah tersebut belum merupakan sekolah favorit, tetapi untuk kenyamanan siswa SMPN 3 Kepanjen memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang membuat siswa menjadi nyaman dalam pembelajaran.

Hal ini dapat disoroti pada SMP Negeri 3 Kepanjen yang sangat konsen terhadap sarana dan prasarana dalam rangka pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang bertujuan untuk memenhi sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 3 Kepanjen yang mengacu pada Permendiknas No 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana sebagaimana yang telah penulis tulis diatas, adapun kondisi sarana dan prasarana saat ini yang ada di SMP Negeri 3 Kepanjen yang termuat pada syarat rasio minimum kelengkapan sarana dan prasarana pada jenjang SMP/MTs

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penting bagi peneliti untuk menggali dan meneliti lebih jauh tentang "Implementasi Kebijakan Pemenuhan sarana danprasarana pendidikan dalam menunjang pembelajaran siswa di SMPN 3 Kepanjen"

1.2 Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam menunjang pembelajaran siswa di SMPN 3 Kepanjen?
- 2. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dilakukan oleh SMPN 3 Kepanjen agar mampu menunjang pembelajaran siswa?

1.3 Tujuan Penelitian

- Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan pemenuhan sarana dan prasrana pendidikan dalam menunjang pembelajaran siswa di SMPN 3
- Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pemenuhan sarana dan prasarana di SMPN 3 Kepanjen agar mampu meningkatkan pembelajaran siswa

1.4 Kontribusi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menyumbang kontrbusi baik secara akademis maupun praktis baik pihak-pihak yang bersanngkutan. Adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Akademis

Sebagai salah satu bahan rujukan atau referensi untuk penelitian dan karya tulis ilmiah yang relevan bagi penelitian yang akan dilaksanakan selanjutnya, serta sebagai sumbangsih kepada keilmuan pendidikan lebih khusus pada sekolahsekolah.

BRAWIJAN

2. Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas keilmuan dan wawasan bagi penelitiaan mengenai implementasi kebijakan pemenuhan sarana dan prasarana dalam menunjang pembelajaran siswa.

b. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi SMPN 3 Kepanjen serta dapat memberikan konstribusi kepada kepala sekolah terkait pentingnya kebijakan dalam pemenuhan sarana dan prasarana dalam menunjang proses pembelajaran siswa.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini deiharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami pentingnya Implementasi Kebijakan pemenuhan Sarana dan Prasarana Dalam Menunjang Pembelajaran Siswa.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini didasarkan pada buku pedoman penyusunan dan ujian skripsi yang dibuat oleh Fakultas Ilmu Administrasi.

Adapun terbagi menjadi sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang yang mengemukakan tentang alasan yang melatar belakangi penelitian ini, perumusan masalah yang merupakan

masalah yang timbul dan akan dicari jawabnnya, tujuan penelitian yang menguraikan hasil apa yang ingin dicapai dalam penelitian, kontribusi penelitian merupakan pernyataan tentang kontribusi peneletian secara spesifik.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan teori-teori yang dipergunakan dalam disiplin ilmu sosial yang ada kaitannya dengan materi penulisan skripsi, dalam hal ini mengenai masalah kebijakan dalan Permendiknas No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang meliputi : jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, dan situs penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan keabsahan data.

BAB IVPENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini berisikan gambaran umum lokasi penelitian gambaran umum Kabupaten Malang dan SMP Negeri 3 Kepanjen, serta menganalisa dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 3 Kepanjen.

Dimana dalam Bab ini memaparkan kesimpulan dari hasil pembahasan serta pemberian saran atas hasil atau temuan yan sudah dilaksanakan.



BABII

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan

2.1.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu tindakan atau keputusan yang diambil dan disepakati oleh sesama untuk memecahkan masalah atau merealisasikan tujan yang sudah di tetapkan sebelumnya, dalam pengertian kebiajakn tersebut peneliti beracuhan pada teori sebagai berikut; Anderson (1984:3), menjelaskan kebijakan merupakan tindakan yang memiliki tujuan dimana dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian, Eyestone dalam Winarno (2014:7) menjelaskan kebijakan secara harfiah merupakan keterkaitan atau hubungan unit pemerintah dengan lingkungan. Selanjutnya, Freidrich sebagaimana yang dikutip winarno (2012:17) merumuskan kebijakan sebagai berikut:

"kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu."

Dengan adanya pengertian kebijakan tersebut, kebijakan yang dibuat ataupun di keluarkan harus memenuhi kepentingan-kepentingan masyarakat, guna menjadi alat pengendali dalam mengatasi permasalahan yang seringkali muncul di masyarakat, agar terwujudnya ciat-cita dan tujuan yang sudah di tentukan sebelumnya.

BRAWIJAY

2.1.2 Tujuan Kebijakan

Kebijakan dibuat bukan tanpa tujuan, melaikan kebijakan dibuat dengan tujuan yang besar agar menjadi pengendali yang baik, berikut tujuan dari pembuatan kebijakan:

- a. Mewujudkan kesetabilan Negara
- b. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat
- c. Menjamin hak dan kewajiban masyarakat
- d. Menjaga perdamaian dan ketentraman

2.1.3 Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan serangkai tindakan yang terorientasikan kepada ketetapan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama dengan benar-benar atas nama kepentingan publik untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati sebelumnya, dalam pengertian kebiajakn tersebut peneliti beracuhan pada teori sebagai berikut; (Hamdi 2014:37) menjelaskan kebijak publik merupakan pola tindakan ditetapkan oleh pemerintah dan terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Negara. Kemudian, Federick sebagaimana dikutip Agustino (2008:7) memaparkan kebijakan publik sebagai berikut:

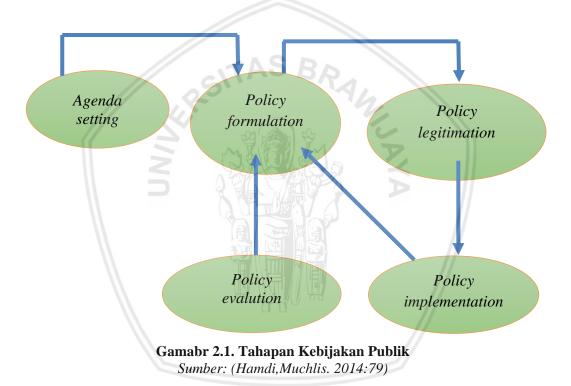
"Kebijakan sebagai tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesmpatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu."

Selanjutnya, (Suharto, 2008:32) menjelesakan kebijakan publik merupakan instrument pemerintahan yang berupa keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan

tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finasial dan manusia demi kepentingan publik.

2.1.4 Tahapan Kebijakan Publik

Dalam proses kebijakan publik terdapat tahapan yang harus dilakukan dalam mewujudkan ataupun merealisasikan kebijakan publik :



a. Penentuan Agenda (agenda setting)

Penentuan agenda merupakan tahap awal dalam merumuskan sebuah kebijakan publik, yang dimana diawali oleh mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam masyarakat yang selanjutnya pemerintah hadir dengan tindakan-tindakanya untuk memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya, Hamdi,Muchlis (2014:80) menjabarkan penentuan agenda merupakan mekanisme dan dinamika dari

transformasi suatu kondisi dalma masyrakat menjadi suatu masalah kebijakan yang harus dicarikan jalan keluaranya melalui penggunaan kekuasaan pemerintah untuk membuat kebijakan. Kemudian, Kingdon, (1995) dalam Hamdi, Muchlis (2014:80) memaparkan penentuan agenda adalah daftar perihal atau masalah untuk mana pejabat pemerintah, dan orang-orang di luar pemerintah yang terkait erat dengan para pejabat tersebut, memberikan perhatian serius pada saat tertentu.

b. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*)

Forumulasi kebijkan merupakan perumusan alternatif pemecahan masalah yang dimana selanjutnya akan menjadi desain dan rancangan tujuan kebijakan serta strategi untuk mencapai tujuankebijakan tersebut. Menurut Kraft& furlong (2007:71) dalam Hamdi,Muchlis (2014:87) menjelaskan formulasi kebijkan merupakan desain dan penyususnan rancangan tujuan kebijakan serta strategi untuk pencapaian tujuan kebijakan. Selanjutnya Hamdi, Muclis (2014:88) memaparkan bahwa perumusan laternatif kebijakan pada dasarnya adalah hasil dari kegiatan peramalan mengenai kondisi yang perlu atau dapat diwujudkan berkaitan dengan pemecahan masalah kebijakan.

c. Penetapan Kebijakan (*Policy Legitimation*)

Penetapan kebijakan merupakan proses pengambilan keputusan terthadap alternatif pemecahan permasalahan yang ada sebelumnya, yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dengan kegiatan legislasi yang telah terlaksanakan. Menurut Karft & Furlong dalam Hamdi,Muchlis(2014:94) penetapan kebijakan merupakan mobilisasi dari dukungna politik dan penegasan kebijakan secara formal termasuk justifikasi untuk tindakan kebijakan. Selanjutnya, Hamdi,

Muchlis (2014:94) memaparkan bahwa penetapan kebijakan merupakan proses legitimasi dari alternative yang dipilih, yang mana berupa suatu rancangan tindakan-tindakan yang ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan.

d. Implementasi kebijakan (*Policy Implementation*)

Pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu proses yang penting dalam menerapkan sebuah kebijakan karena pelaksanaan kebijakan merupakan tahap yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang menjadi actor dalam melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pentingan sebuah pelaksanaan kebijakan juga dikemukaan oleh Grindel dalam Wahab (2004:59) yang menerangkan bahwa implementasi tidak sekedar pelaksanaan penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-sa;uran birokrasi, melaikan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan.

e. Evaluasai kebijakan (*Policy Evalution*)

Evaluasi kebijakan merupakan tahap identifikasi hasil-hasil dan hambatan-hambatan dari terlaksanayan suatu kebijakan yang telah diterapkan, dengan harapan adanya umpan-balik dari kebijakan tersebut untuk menentukan masa depan dari kebijakan tersebut. Menurut Rossi & Frreman (1985:13) yang di kutip oleh Wahab (2004:107)

"Evaluations are undertaken for a variety of reasons: to judge the worth of on going programs and to estimate the usefulness of attempts to improve them; to assess the utility of innovative programs and intiatives; to increase the effectiveness of program management and administration; and to meet various accountability reqirements. Evaluation may also contribute to substantive and methodological social science knowledge."

(Evaluasi dilakukan karena berbagai alasan: untuk menilai manfaat dari program yang sedang berjalan dan memperkirakan manfaat upaya untuk memperbaikinya; untuk menilai kegunaan program inovatif dan inisiatif; untuk meningkatkan efektivitas pemenuhan dan administrasi program; dan untuk memenuhi berbagai persyaratan akuntabilitas. Evaluasi juga dapat berkontribusi pada pengetahuan ilmu sosial yang substantif dan metodologis.)

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan dalam proses kebijkanan publik, yang dimana dalam tahap ini adalah pelaksanaan dari penjabaran keputusan-keputusan yang berbentuk prosedur-prosedur untuk betujuan menyelesaikan permasalahan masyarakat yang ditandai oleh timbulnya gap antara formulasi kebijakan dengan pelaksanaan kebijkan, yang dimana terciptanya dampak dari pengimplementasian tersebut yang selanjtnya akan dievaluasi untuk mengambil keputusan kelayakan kebijakan tersebut. Implementasi memiliki peran penting dalam merealisasikan kebijakan karena tanpa adanya implementasi kebijkan hanya sebauah aturan-aturan di selembar kertas. Pemerintah selaku pelaksana implementasi kebijkan dapat membangun jaringan yang memungkinkan tujuaan kebijakan publik direalisasikan dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Menurut Udoji (1981;32) yang dikutip oleh Abdul Wahab (2004;59)

"the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented." (pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatau yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau renecana bagus yang tersimpan rapi dalama arsip kalau tidak diimplementasikan.)

Selanjutnya, Mazmanian & Sabatier dalam Abdul Wahab (2004:68) merumuskan proses kebijakan yaitu:

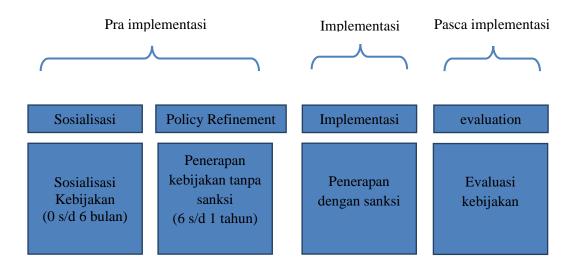
"implementation is the carrying out of a basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the from of important executive orders or court decisions. Ideally, that decision identifies the problems to be addressed, stipulated the objectives to be pursed, and, in a variety of ways, "structures" the implementation process. The process normally runs through a number of stages beginning with passage of the basic statute, followed by the policy output (decisions) of the implementing agencies, the compliance of target groups with those decisions, the actual impact – both intended and unintended – of those outputs, the perceived impacts of agency decisions, and, finally, important revisions (or attempted revision) in the basic statute." (implementasi adalah keputusan kebijakasaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula bentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan maslah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mensturkturkan atau mengatur proses imprmrntasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata -- baik yang dikehendaki atau yang tidak – dari output tersebut, dampak keputusan sebagaia dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang atau peraturan yang bersangkutan.)

2.2.2 Langkah-langkah Implementasi Kebijakan

Untuk menyukseskan berjalanya proses implementasi kebijakan, didukung oleh tahapan atau langkah-langkah dalam pengimplementasian kebijakan. Tachjan (2006:35) memaparkan 3 (tiga) tahapan implementasi kebijakan:

- 1) Merancang banguna (mendesain) program beserta perincoian tugas dan perumusan tujuan yang jelas.
- 2) Melaksanakan (mengaplikasikan) program, dengan medayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana dan sumber-sumber lainnya, prosedur-prosedur, dan metode-metode yang tepat.
- 3) Membangun system penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengaawsa yang teapt guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaa kebijakan.

Dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan ada saatnya untuk melaksanakan implementasi kebijakan tersebut tanpa merlukan waktu yang banyak untuk melaksanakanya, karena ada kebijakan yang urgensifitasnya tinggi dan memerlukan waktu yang cepat dalam penangananya (Nugroho,Riant, 2011:660). Nugroho juga menggambarkan tahapan implementas kebijak sebagai berikut



Gambar 2.2. Tahapan Implementasi

Sumber: Riant Nugroho (2011:661)

Dari penggambaran Nugroho atas tahapan implementasi kebijakan diatas, sebuah implementasi kenijakan diawali dengan adanya sosiali sasi yang memiliki bermacam cara diantaranya:

- Pejabat Negara menandatangani naskah kebijakan publik melalui seremoni yang diliput oleh media massa dan disiarkan secara langsung kepada public.
- 2) Pertemuan pers dan / atau publikasi melalui media massa.
- 3) Temu public.
- 4) Seminar, sarasehan, konferensi, dan talk show.
- 5) Sarana pengingat lain, seperti brosur, *leaflet*, stiker, lagu, dan lain-lain, (Nugroho, Riant 2011:659).

Berdasarkan beberapa tahapan diatas, dalam implementasi kebijakan terdapat umpan balik dari hasil implementasi kebijakan tersebut, yang juga menjadi tahapan dalam implementasi kebijkan, ini dijelaskan oleh Wahab (2004:102) yang memaparkan tahapan-tahapan implementasi:

- 1) Output-output kebijaksanna (keputusan-keputusan) dari badan-badan pelaksan.
- 2) Keputusan kelompok-kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut.
- 3) Dampak nyata keputusan-keputusan badan-badan pelaksana.
- 4) Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan tersebut.
- 5) Evaluasi system politik terhadap undang-undang, baik berupa perbaikanperbaikan mendasar (ataupun upaya untuk melaksanakan perbaikan) dalam muatan atau isinya. Semua tahapan diatas seingkali digabung menjadi satu di bawah pokok bahasan mekanisme umpan balik.

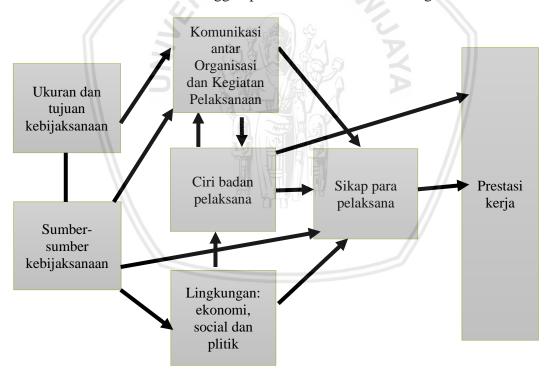
2.2.3 Model-model Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan dalam pelaksananya terdapat beberapa model yang dapat digunakan, model implementasi kebijakan yang ditawarkan oleh *Van Meter dan Van Horn dengan A Model of the Policy Implementation Process*yang

diartikan model proses implementasi kebijaksanaan. Dalam model ini Van Meter dan Van Horn memaparkan enam variable bebas (*independent variable*) yang saling berkaitan:

- 1) Ukuran dan tujuan kebijaksanaan.
- 2) Sumber-sumber kebijaksanaan.
- 3) Ciri-ciri atau sifat badan atau instansi pelaksana.
- 4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
- 5) Sikap para pelaksana.
- 6) Lingkungan ekonomi, social dan politik (Wahab, Abddul, 2004:79)

Van Meter dan Van Horn menggamparkan model tersebut sebagai berikut:



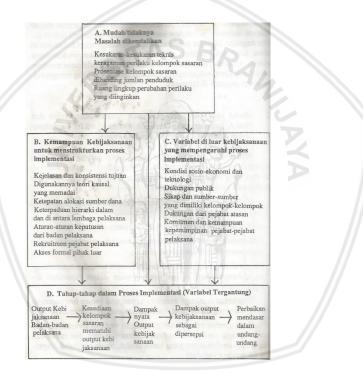
Gambar 2.3. Model implementasi Kebijakan Publik

Sumber: Van Meter & Van Horn (Wahab, 2004:80)

Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier, memaparkan model implementasi kebijakan yang disebut *A Frame Work for Implementation Analysis* atau diartikan sebagai kerangka analisis implementasi, dengan memiliki 3 (tiga) Variabel sebgai berikut:

- 1) Mudah tidaknya masalah yang aka digarap dikendalikan
- 2) Kemampuan keputusan kebijakasanaan untuk menstrukturkan secara tempat proses implementasi
- 3) Pengaruh langsung sebagai variable politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut (Wahab, 2004:81)

Dalam modelnya Mazmanian & Sabatier mengambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.4. Model Implementasi Kebijakan

Sumber: Mazmanian & Sabatier (Wahab, 2004:82)

Model selanjutnya yang ditawarkan oleh C. Edward III, dimana memiliki 4 (empat) varialbel, sebagai berikut:

1) Komunikasi

Implementasi kebijakan akan berjalan dengan evektif apabila komuniaksi hirarki ataupu komunikasi sercara organisasi bejlana dengan baik, dengan adanya komunikasi yang baik pemaham para pembuat keputusan akan memahami apa yang harus dikerjakan dalam mengambil keputusan, yang selanjutnya akan ditransmisikan secara teapt dan akurat kepada para implementator. Menurut Suparno (2017:34) ada 3 (tiga) indicator dari variable komunikasi yaitu (1) transmisi yang baik, (2) kejelasan komunikasi dan (3) konsistensi pemerintah dalam pelaksanaan komunikasi.

2) Sumber Daya

Pelaksanaan implementasi kebijakan memerlukan sumber-sumber untuk menjalankan kebijakan, oleh karena itu kekuranga ataupun ketidak lengkapan sumber daya sangatlah berpengaruh kepada hasil dari implementasi kebijaka itu senidiri, oleh karena itu perluh sumber daya yang berkopeten dalam melaksanakan implementasi kebijakan tersebut. Indicator dari kopetensi sumber daya implementasi kebijakan dirumuskan oleh Suparno (2017:34) yaitu (1) Staff yang mencukupi dan berkopetensi, (2) Informasi cara pelaksanaan data kepatuhan, (3) Wewenang formal, dan (4) Fasilitas.

3) Disposisi

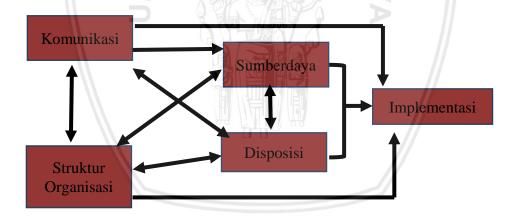
Porses implementasi tidak akan berjalan secara efektif apabila kepatuhan dari implementator tidak bersikap kooperatif yang mengakibatkan terhalangnya atau terhambatnya porses implementasi kebijakan yang sudah di tetapkan sebelumnya. Dengan demikian perlu sekali sikap para pelaksana kebijakan dalam kesediaan menerima dan melaksanakan suatu kebijakan tanpa rasa terpaksa demi

terwujutnya tujuan kebijakan. Suparno (2017:34) merumuskan 2 (dua) indicator dari disposisi yaitu (1) Pengangkatan birokrat dan (2) Insentif.

4) Struktur Oraganisasi

Edeward III memaparkan karkateristik utama dalam birokrasi yaitu prosedur kerja baku standar atau *Standard Operating Procedure* (SOPs) dan fragmentasi, yang dimana dalam mengejahwatakanya didalam struktur organisasi terdapat, kerjasama, koordinasi serta prosedur yang sangat menentukan keefektivitasan implementasi kebijakan.

George C. Edward III dalam Suparno (2017:33) menggambarkan model implementasi kebijakan, sebagai berikut:



2.2.4 Faktor- faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Telah dikemukakan diatas bahwa proses implementasi merupakan proses yang rumit dan kompleks. Hal ini dipahami karena proses implementasi melibatkan interkasi banyak variabel sekaligus proses merumuskan mekanisme *delivery activities*. Kompleksitas dalam proses implementasi tidak jarang memunculkan

sejumlah permasalahan. Edward III (1980) mengidentifikasikan ada empat *critical* factors yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi.

Keempat faktor tersebut adalah: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau perilaku, dan struktur birokrasi.

Di indonesia sendiri telah banyak contoh kegagalan implementasi kebijakan maupun program. Kegagalan implementasi yang terjadi di Indonesia tidak jauh berbeda dengan kegagalan yang ditemukan di negara lain. Setidaknya ada enam faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu:

- Kualitas kebijakan itu sendiri. Kualitas di sini menyangkut banyak hal, seperti: kejelasan tujuan, kejelasan implementor penanggung jawab atau implementasi, dan lainnya. Lebih dari itu, sebagaimana dikatakan oleh deLeon (2002) dalam (Purwanto dan Dyah 2015: 86) kualitas suatu kebijakan akan sangat ditentukan oleh proses perumusan kebijakan itu sendiri. Suatu kebijakan yang dirumuskan secara demokratis akan sangat memberikan peluang dihasilkannya kebijakan yang berkualitas.
- 2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran). Suatu kebijakan atau program tidak akan dapat mencapai tujuan atau sasaran tanpa dukungan anggaran yang memadai. Menurut bahasa Wildavsky(1979) dalam (Purwanto dan Dyah 2015: 86), besarnya anggaran yang dialokasikan terhadap suatu kebijakan atau programmenunjukkan seberapa besar *political will* pemerintah

3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya). Dengan analogi suatu penyakit, maka untuk menyembuhkannya diperlukan obat yang tepat. Demikian juga persoalan publik yang ingin dipecahkan oleh suatu kebijakan juga memerlukan instrumen yang tepat. Instrumen tersebut dapat berupa memberikan hibah barangbarang tertentu (misalnya memberikan peralatan bengkelkepada para pemuda yang sudah diberi pelatihan ketrampilan agar mereka dapat memulai menjadi seorang wirausaha). Tentu setiap persoalan akan membutuhkan bentuk instrumen yang berbedabeda. Ketepatan instrumen ini akansangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan

- 4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM koordinasi pengawasan, dan sebagainya). Struktur organisasi yang terlalu hirarkis tentu akan menghambat proses implementasi.
- 5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak). Karakteristik kelompok sasaran tersebut akan sangat berpengaruh terhadap dukungan kelompok sasaran terhadap proses implementasi).
- 6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi dan politik di mana implementasi tersebut dilakukan. Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil ketika diimplementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif terhadap upaya pencapaian tujuan kebijakan.

Menurut Goggin et al.(1990) dalam (Purwanto dan Dyah 2015: 89), kebijakan diasumsikan sebagai suatu"pesan" daripemerintah federal (pusat) kepada pemerintah daerah.Keberhasilan implementasi pesan tersebut sangat dipengaruhi oleh 3hal pokok:

- a. Isi kebijakan (the content of the policy message)
- b. Format kebijakan(the form of the policy message)
- c. Reputasi aktor (*the reputation of the communicators*)Isi kebijakan meliputi sumberdaya, manfaat kebijakan, serta keterlibatan publik.

Rondinelli dan Cheema (1983:28) dalam (Purwanto& Dyah 2015: 90) mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- a. Kondisi lingkungan (enviromental conditions)
- b. Hubungan antar organisasi (inter-organizational elationship)
- c. Sumberdaya (resources)
- d. Karakter institusi implementor (characterisic implementing agencies)

Kemudian Dwiyanto dkk (2006:144-222) dalam (Purwanto dan Dyah 2015: 90) mengungkapkan bahwa kinerja pelayanan publik juga dipengaruhi oleh faktorfaktor sebagai berikut:

- a. Kewenangan diskresi, yaitu langkah yang ditempuh oleh administrator untuk menyelesaikan suatu kasus tertentu yang tidak atau belum diatur dalam suatu regulasi yang baku
- b. Orientasi terhadap perubahan, menunjuk sejauhmana kesediaan aparat birokrasi menerima perubahan
- c. Budaya paternalisme, merupakan sistem yang menempatkan pimpinan sebagai pihak yang paling dominan
- d. Etika pelayanan, dilihat dari apakah seorang aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merasamempunyai komitmen untuk menghargai hak-hak dari konsumen untuk mendapatkan pelayanan secara transparan, efisien, dan adanya jaminan kepastian pelayanan
- e. Sistem insentif, berupa pemberian penghargaan materi maupun nonmateri kepada karyawan yang berprestasi untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan. Sedangkan bagi karyawan yang

tidak berprestasi diberikan disinsentif berbentuk teguran, peringatan, penundaan/penurunan pangkat, atau pemecatan.

f. Semangat kerja sama, dikonsepkan sebagai keterpaduan tim

2.3 Kebijakan Publik dalam Bidang Pendidikan

Pendidikan tidak pernah steril dari kebijakan baik kebijakan tingkat lokal, regional, maupun nasional. Kebijakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang dari kepala sekolah hingga Menteri merupakan kebijakan publik. Dengan peran yang aktif masyarakat tidak lagi sebagai objek penderita atas berbagai kebijakan publik. Keterbukaan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kebijakan publik di bidang Pendidikan harus dimanfaatkan dengan baik, antara lain dengan mengambil inisiatif atas sebuah kebijakan karena kebijakan publik dapat bersifat bottom up.Inisiatif tersebut dapat berbentuk hearing dan diskusi dengan pihak eksekutif maupun legislatif.

Aspek pendidikan yang merupakan kajian pemenuhan pendidikan merupakan public goods bukan private goods. Di dalam konteks ini,pendidikan merupakan barang dan jasa milik umum (publik), yang mana masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran (pasal 31 UUD 1945), dan pendidikan merupakan kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya, utamanya peranan mendasar menyediakan kesempatan belajar. Oleh karena pendidikan merupakan public goods, maka sudah semestinya kajian kebijakan pendidikan masuk dalam perspektif kebijakan publik dalam dimensi kajian pemenuhan pendidikan yang multidisipliner.

Kompleksitaskebijakan pendidikan sungguh sulit mengaplikasikan bagaimana mengalokasikan sumberdaya politik (*political resources*) status, legitimasi, kewenangan, kekuasaan, kepentingansecara tepat. Di dalam kasus lain, sesungguhnya sangat sulit untuk merumuskan realitas masalah sosial politik dalam ukuran kuantitatif. Demikian pula dengan sejumlah isu dan masalah politik problematik yang dihadapi akan cenderung disederhanakan untuk menyesuaikan diri pada keinginan analis dan metode kuantitatif yang dipakai, sehingga mengakibatkan hal mendasar menyangkut konteks realitas sosial politik yang bersifat keperilakuan dan dianggap tidak bisa dikuantitatifkan, dancenderung diabaikan dan tidak dapat digambarkan secara penuh.

Perspektif kualitatif dari kebijakan pendidikan pada dasarnya merupakan proses pemahaman terhadap masalah kebijakan sehingga dapat melahirkan gagasan atau pemikiran mengenai cara-cara pemecahannya. Masalah kebijakan pendidikan sendiri bersifat kualitatif sehingga prosespemahaman tersebut juga penuh dengan pemikiran yang bersifat kualitatif. Pemahaman terhadap masalah kebijakan pendidikan dilahirkan dari cara berpikir deduktif, cara berpikir yang dimulai dari wawasan teoritis yang dijabarkan menjadi satuan konsep yang lebih operasional dan dapat dihubungkan dengan kenyataan. Wawasan teoritis sendiri tidak berdiri sendiri karena sangat tergantung pada subjektivitas seorang analis dalam memperspektifkan kebijakan pendidikan. Perbedaan wawasan tidak semata disebabkan oleh sifat dan jenis masalah kebijakan, namun cenderung diakibatkan oleh cara pandang berlainan atau perbedaan paradigma pemikiran atau filsafat pemikiran yang berlainan.

Kebijakan Pendidikan menurut Nugroho (2003: 54) dalam Munadi dan Barnawi (2011: 18) dilihat dari empat kuadran tersebut termasuk dalam kuadran 1 sehingga diperlukan partisipasi aktif sektor diluar pemerintah. Argumentasi yang bias dibangun bahwa Pendidikan sebenarnya bias dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi pemerintah menganggap bahwa Pendidikan merupakan kegiatan strategis bagi perkembangan sebuah negara karena penentu kualitas sebuah bangsa terletak pada tingkat Pendidikan yang dicapai penduduknya. Hal ini mengakibatkan pemerintah tidak bias lepas tangan. Keterlibatanmasyarakat dan pemerintah meliputi perencanaan, pembuatan, implementasi, monitoring, dan evaluasi.

Berdasarkan uraian diatas, kebijakan publik bidang pendidikan dapat didefinisikan sebagai keputusan yang diambil bersama antarapemerintah dan aktor diluar pemerintah dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada bidang Pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Kebijakan publik bidang Pendidikan meliputi anggaran Pendidikan, kurikulum, rekrutmen tenaga kependidikan, pengembangan profenional staff, tanah dan bangunan, pengelolaan sumber daya, dan kebijakan lain yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung atas Pendidikan (Alisyahbana, 2000).

Kebijakan publik termasuk di dalamnya kebijakan Pendidikan dalam pembuatannya melalui tahapan yang Panjang. Winarno (2005) maupun Dunn (2003) membaginya menjadi 5 tahapan yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Lima tahap ini kalau mendasarkan pada definisi di atas harus memperhatikan tiga

hal pokok yaitu pemerintah, aktor-aktor diluar pemerintah (kelompok kepentingan dan kelompok penekanan), serta faktor-faktor selain manusia yang akan maupun telah memengaruhi kebijakan.

Kebijakan Pendidikan menurut Devine (2007) dalam (Munadi dan Barnawi 2011: 19) memiliki empat dimensi pokok yaitu dimensi normative, struktural, konsituentif, dan teknis. Dimensi normatif terdiriatas nilai, standar, dan filsafat. Dimensi ini memaksa masyarakat untuk melakukan peningkatan dan perubahan melalui kebijakan yang ada. Dimensi tersebut perlu dukungan dari dimensi struktural. Dimensi ini berkaitan dengan ukuran pemerintah (desentralisasi, sentralisasi, federalatau bentuk lain), dan satu struktur organisasi, metode, dan prosedur yang menegaskan dan mendukung kebijakan bidang pendidikan. Dimensi konstituentif terdiri dari individu, kelompok kepentingan, dan penerima yang menggunakan kekuatan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Dimensi teknis menggabungkan pengembangan, praktik, implementasi, dan penilaian dari pembuatan kebijakan pendidikan.

2.4 Sarana dan Prasarana Pendidikan

2.4.1 Pengertian Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Perencanaan pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pemenuhan pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan pada sekolah menengah tingkat pertama (SMP) merupakan suatu komponen yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar mengajar pada SMP bersamaan dengan komponen pendukung lainnya

Proses belajar mengajar dapat berlangsung jika ada pendidik, peserta didik, alat pendidikan dan lingkungan pendidikan yang mendukung. Semua faktor merupakan sebuah siklus dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan yang ideal sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu banyak komponen pendidikan yang merupakan sebagai satu kesatuan sistem yang lengkapdan terpadu untuk menggerakkan pembelajaran kepada manusia secara sempurna sehingga pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat berjalan sebagaimana yang tealh direncanakan. Salah satu komponen tersebut adalah sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

Lebih tegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 42 bahwa "setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan".

Sedangkan pada ayat (2) menekankan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan ,ruang laboraturium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, temapt berolahraga, tempat beribadah, temapt bermain, tempat berekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Penjelasan diatas sejalan dengan pandagan Mulyasa (2007:49) menyatakan bahwa:

"Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk menunjang proses pendidikan, khususnya dalm proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas,meja,kursi serta alat-alat media pengajaran:. Adapun yang dimaksud prasarana pendidikan atau pengajaran dalam proses pembelajaran, seperti halaman sekolah, kebun sekolah, taman sekolah dan jalan menuju sekolah. Prasarana yang dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar di sekolah, seperti taman sekolah untuk pembelajaran biologi, halaman sekolah sekaligus lapangan olahraga dan lain sebagainya.'

Komponen-komponen sebagaimana yang diseebutkan diatas merupakan sarana pendidikan yang mutlak harus ada dan mempunyai standar, di samping prasarana yang lainnya, sebagai penunjang dalam pembelajaran, hal ini, sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 poin 8 yaitu:

"Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboraturium, bengkel kerja, tempat bermain,tempat berekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi."

Berdasarkan paparan definisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan adalah semua kelengkapan dasar yang secara tidak langsung

menunjang proses pendidikan di sekolah. Dalam pendidikan misalnya lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, ruang dan sebagainya. Sedangkan sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah sperti : ruang,buku,perpustakaan, laboraturium dan sebgainya.

2.4.2 Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Suksesnya pembelajaran di sekolah didukung oleh adanya pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan yang ada disekolah secara efektif dan efisien. Sarana dan Prasarana yang ada di sekolah tersebut perlu didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah. Pengelolaan itu dimaksudkan agar dalam menggunakan sarana dan prasarana disekolah bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang amat penting disekolah, karena keberadaannya akan sangat mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran disekolah.

Disebutkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Sarana pendidikan ini berkaitan erat dengan semuaperangkat, peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan prasarana pendidikan berkaitan dengan semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses

pembelajaran di sekolah seperti : ruang, perpustakaan, kantor sekolah,UKS, ruang OSIS, tempat parkir, ruang laboraturium, dll.

2.4.3 Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Untuk mengatur dan mempersiapkan segala peralatan dan material yang dibutuhkan sebagai penunjang demi terlancarnya proses kegiatan belajar mengajar disekolah perlu adanya sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas tentang itu. Pengalaman yang dimiliki seseorang baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun dalam keahlian (SDM) akan berpengaruh besar dalam melakukan perencanaan kebutuhan, pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan. Ilmu pemenuhan mengupas tentang usaha-usaha manusia dalam memanfaatkan semua potensi yang ada secara optimal guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Dubrin dalam Rasima (2007:11) menegaskan bahwa " sumber daya yang dimaksudkan dalam pemenuhan dapat dibagi kedalam empat bentuk yaitu:

- (a) Human Resource, adalah manusia yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaanya.
- (b) Finansial Resource, merupakan uang yang dipergunakan manajer dan organisasi untuk membiayai pekerjaan guna mencapai tujuan organisasi.Physical Resource, merupakan barang dan bangunan termasuk bahan baku, ruang kantor, fasilitas produksi, dan peralatan kantor yang dipergunakan untuk beroperasinya suatu organisasi.

(c) Informasional Resorce, merupakan data yang dipergunakan manajer dan organisasi sebagai dasar pertimbangan untuk menjalankan pekerjaan dalam mencapai tujuan organisai

Semakin kompleknya kebutuhan dalam menyelenggarakan pendidikan, semakin besar akan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, semakin majunya pengetahuan maka semakin sistematis penataan dan pendekatan yang diperlukan.

Dalam hal ini Bafadal (2008:27) menawarkan beberapa kriteria perencanaan pengadaan perlengkapan sekolah sebagai berikut:

- (a) Perencanaan perlengkapan sekolah itu merupakan proses menetapkan dan memikirkan
- (b) Objek pikir dalam perencanaan perlengkapan sekolah adalah upaya memenuhi sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan sekolah
- (c) Tujuan perencanaan perlengkapan sekolah harus memenuhi prinsip-prinsip.
 - (1) Perencanaan perlengkapa sekolah harus betul-betul merupakan proses intelektual.
 - (2) Perencanaan didasarkan pada analisis kebutuhan melalui studi komprehensip mengenai masyakat sekolah dan kemungkinan pertumbuhannya serta prediksi populasi sekolah.
 - (3) Perencanaan perlengkapan sekolah harus realistis, sesuai dengan kenyataan anggaran.

(4) Visualisasi hasil perencanaan perlengkapan sekolah harus jelas dan rinci, baik jumlah,jenis.merek,dan harganya.

Kriteria diatas perlu ditaati, disamping itu ada beberapa langkah perencanaan, pengadaan, perlengkapan yang harus diperhatikan. Lebih lanjut Bafadal (2008:29), berpendapat bahwa ada beberapa langkah perencanaan pengadaan perlengkapan pendidikan di sekolah, yaitu sebagai berikut:

- (a) Menampung semua usulan pengadaan perlengkapan sekolah yang diajukan setiap unit kerja sekolah dan menginvestasikan kekurangan perlengkapan sekolah.
- (b) Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah untuk periode tertentu, misalnya untuk satu triwulan atau satu tahun ajaran.
- (c) Memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang telah tersdia sebelumnya. Dalam rangka itu perencana atau panitia pengadaan mencari informasi tentang perlengkapan yang telah dimiliki oleh sekolah. Salah satu cara adalah dengan jalan membaca buku inventaris atau buku induk barang. Berdasarkan panduan tersebut lalu disusun rencana kebutuhanperlengkapan, yaitu mebuat daftar semua perlengkapan yang dibutuhkan di sekolah.
- (d) Memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran sekolah yang telah tersedia. Apabila dana yang tersedia tidak mencukupi untuk pengadaan kebutuhan ini maka perlu dilakukan seleksi

terhadap semua kebutuhan perlengkapan yang telah direncanakan, dengan melihat urgensi setiap perlengkapan tersebut.

a. Memadukan rencana (daftar) kebutuhan perlengkapan dana atau anggaran yang ada. Apabila ternyata masih melebihi dari anggaran yang telah tersedia perlu dilakukan seleksi lagi dengan cara membuat skala prioritas.

(e) Penetapan rencana pengadaan akhir.

Aktivitas pertama dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan adalah pengadaan sarana prasarana pendidikan. Pengadaan perlengkapan pendidikan biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan pendidikan di suatu sekolah menggantikan barang-barang yang rusak, hialng, dihapuskan, atau sebab-sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan pergantian, dan untuk menjaga tingkat persediaan barang setiap tahun dan anggaran mendatang.

Kebutuhan akan sarana dan prasarana pendidikan haruslah direncanakan. Sebagai manajer pendidikan, Kepala Sekolah haruslah mempunyai proyeksi kebutuhan daraanaa dan prasarana untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Proyeksi kebutuhan akan sarana dan prasarana sekolahdibuat dengan mempertimbangkan dua aspek yaitu, kbutuhan aspek pendidikan di satu pihak dan kemampuan sekolah di pihak lain.

Setelah rencana pengadaan sarana dan prasarana dibuat langkah berikutnya yaitu pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan sekolah. Pengadaan sarana dan prasarana ini, bisa dilakukan dengan pembelian, meminta sumbangan,

pengajuanj bantuan ke pemerintah (untuk sekolah-sekolah negeri), pengajuan ke komite sekolah, tukar menukar dengan sekolah lain dan menyewa.

Tim yang ditunjuk untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana sekolah hendaknya membuat daftar ceklis tentang berbagai jenis sarana dan prasarana yang akan diadakan, semua spesifikasi teknis, standar kualtias akan mudah direalisasi dan dikontrol. Oleh karena itu agar spesifikasi teknis, standar kualitas dan utilitas sarana dan prasarana yang proses pengadaannya dengan meminta sumbangan atau bantuan dari pemerintah tidak mengalami deviasi perlu dibuat proposal yang jelas.

Sebelum proposal diselesaikan, tim yang ditunjuk oleh sekolah melakukan survey baik terhadap harga,merek, dan kualifikasi barang yang dibutuhkan sebagai kajian banding atas berbagai jenis barang dengan merek dan spesifikasi teknisnya, sehingga jenis barang yang akan diminta dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya (standar kualitasnya). Kemampuan sekolah sangat menentukan dalam merumuskan kebutuhannya sendiri(termasuk didalamnya sarana dan prasarana sekolah), dengan memenuhi aspek utilitas dan memenuhi syarata standar kualitas.

2.4.4 Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pemenuhan aset sekolah merupakan upaya untuk mengelola sarana dan prasarana sekolah agar nilai gunanya tidak merosot. Kata "pemanfaatan" adalah serangkaian kegiatan terencana dan sistematis yang dilakukan secara rutin maupun berkala, jadi anjurahn untuk memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1993 tentang Sistem Pendidikan Dasar dan

Menengah menegaskan bahwa "guru wajib menggunakan pperrangkat atau sarana pendidikan seperti laboraturium untuk kegiatan proses belajar mengajar dan dibarengi dengan peningkatan frekuensi penggunaan secara maksimal". Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut menggunakan sarana pendidikan merupakan kewajiban.

Bafadal (2008:42) Menawarkan bahwa "ada tiga hal pokok yang perlu dilakukan oleh persinal sekolah yang akan memakai perlengkapan di sekolah, yaitu : (a) memahami petunjuk penggunaan perlengkapan pendidikan, (b) menata perlengkapan pendidikan, (c) memelihara, baik secara kontinyu maupun berkala terhadap perlengkapan pendidikan.kesanggupan dan kemampuan melaksanakannya sebagai prasyarat bagi terciptanya kerjasama yang harmonis dan optimal untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Secara umum aset pemenuhan ini menyangkut kegiatan inventarisasi atau penyusunan data-base sarana dan prasarana sekolah,penyusunan program pemeliharaan ,perawatan,perbaikam dan pembangunan (kembali) gedung sekolah, perangkat dan lingkungannya. Pemenuhan aset sekolah ditingkat sekolah itu sendiri menyangkut upaya pemeliharaan dan perawatan kecil yang dilakukan oleh warga sekolah itu sendiri (siswa,guru,penjaga,komite sekolah,masyarakat sekitar).

2.5 Pembelajaran

2.5.1 Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran adalah kegiatan mengelola lingkungan agar tejadi tindak belajar pada seseorang (sejumlah orang) secara efektif dan efisien. Pembelajaran adala suatu kombinasi yang tersusun melalui unsur-unsur manusiawi,material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengarui dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Manusia terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnya, misalnya tenaga laboraturoium. Material, meliputi buku-buku, pappan tulis, kapur,fotografi, slide dan film, audio. Fasilitas dan perlengkapan terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan audiio visual, juga computer. Prosedur, meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi, praktek,belajar, ujian dan sebagainya.

Pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi duaarah, mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid.

UUSPN No 20 Tahun 2003 menyatakan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreatifitas berfikir yang dapat meningkatkan kemampuan berfikir siswa serta dapat meningkatkan kemampuan mengkontruksi pengetahuan

baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran.

2.5.2 Perencanaan Pembelajaran

Keberhasilan suatu proses pembelajaran ditentukan oleh perencanaan yang matang. Perencanaan yang dilakukan dengan baik, maka setengah keberhasilan sudah dapat tercapai, setengahnya lagi terletak pada pelaksanaannya. Dengan adanya perencanaan, guru dapat menentukan strategi atau langkah secara sistematis untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran.

Sehingga perencanaan pembelajaran merupakan suatu kegiatan merumuskan tujuan-tujuan apa yang ingin dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran, cara apa yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, materi atau bahan apa yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, materi atau bahan apa yang akan disampaikan, bagaimanacara menyampaikan bahasa serta media atau alat apa yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tersebut.

2.5.3 Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran adalah interaksi guru dan siswa dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa dan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran terjadi proses interaksi yang bersifat edukatif antara guru dan siswa. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut bermuara pada satu tujuan yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dapat dipahami bahwa proses pemebelajaran adalah merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh guru dengan siswa dengan menjalin komunikasi edukatif dengan menggunakan strategi-strategi, pendekatan, pprinsip dan metode tertentu dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien berdasarkan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.

2.5.4 Tujuan Pembelajaran

Yang menjadi kunci dalam rangkamenentukan tujuan pembelajaran adalah kebutuhan siswa, mata ajaran, dan guru itu sendiri. Berdasarkan kebutuhan siswa dapat ditetapkan apa yang hendak dicapai, dikembangkan dan diapresiasi. Berdasarkan mata ajaran yang ada dalam petunjuk kurikulum dapat ditentukan hasil-hasil pendidikan yang diinginkan. Hamalik (2008:76)

Tujuan adalah rumusan yang luas mengenai hasil-hasil pendidikan yang diinginkan. Di dalamnya terkandung tujuan yang menjadi target pembelajaran dan menyediakan pilar untuk menyediakan pengalaman-pengalaman belajar.

Untuk merumuskan tujuan pembelajaran kita harus mengambil suatu rumusan tujuan dan menentukan tingkah laku siswa seccara spesifik yang mengacu ke tujuan tersebut. Tingkah laku yang spesifik harus dapat diamati oleh guru yang ditunjukkan oleh siswa, misalnya mebaca lisan, menulis karangan, dll. Untuk

mengoperasionalkan tujuan pembelajaran guru dapat mengamati dan menentukan kemajuan siswa .

2.5.5 Media Pembelajaran

Media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata "medium" yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dengan demikan media adalah segala alat yang digunakan oleh guru dalam proses belajar, jadi media dapat memudahkan seorang guru dalam mengajar, selain itu penggunaan media dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. Djamarah.(2010:85)

Sudjana dalam Pengewa merumuskan fungsi alat/media pembelajaran menjadi enam kategori sebagai berikut:

- 1. Penggunaan media dalam proses belajar mengajar bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi mempunyai fungsi sendiri sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif.
- Penggunaan media pengajaran merupakan bagian yang integraldari keseluruhan situasi mengajar.ini berarti bahwa media pengajaran merupakan salah satu unsur yang dikembangkan guru.
- 3. Media pengajaran dalam pembelajaran, penggunaan integral dengan tujuan dan isi pelajaran. Fungsi ini mengandung pengertian bahwa penggunaan/pemanfaatan media harus melihat kepada tujuan dan bahan pelajaran.

- Penggunaan media dalam pengajaran bukan sekedar alat-alat hiburan dalam arti digunakan hanya sekedar melengkapi proses belajar supaya lebih menarik perhatian siswa.
- Penggunaan media dalam pengajaran lebih diutamakan untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam merangkap pengertian yang diberikan guru.
- 6. Penggunaan media dalam pengajaran diutamakan akan mempertinggi mutu belajar mengajar. Dengan perkataan lain menggunakan media, hasil belajar yang dicapai siswa akan tahan lama diingat siswa sehingga mempunyai nilai tinggi.

2.6 Sarana Prasarana Pendidikan untuk Menunjang Proses Belajar Mengajar Siswa

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu fondasi utama untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada lima faktor penting yang harus ada pada proses belajar mengajar yaitu : guru,murid,tujuan,materi, dan waktu. Jika salah satu faktor saja dari faktor tersebut tidak terpenuhi, maka tidak mungkin terjadi proses belajar mengajar. Dengan 5 faktor tersebut, proses belajar mengajar dapat dilaksanakan walaupun kadang-kadang dengan hasil yang minimal pula. Hasil tersebut dapat ditingkatkan apabila ada sarana penunjang , yaitu faktor fasilitas/Sarana dan Prasarana Pendidikan. Menurut E.Mulyasa, (2004:58) bahwa : Sarana Pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan menunjang dan proses pendidikan, khususnya proses

belajar,mengajar,seperti gedung,ruang kelas,meja,kursi,serta alat-alat dan media pengajaran.

Pengelolaan sarana dan prasarana itu sangat penting karena pengelolaan adalah salah satu proses yang dilakukan agar suatu usaha dapat berjalan dengan baik dengan mengimplementasikan fungsi-fungsi daripada pemenuhan, dengan tujuan dapat lebih dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Berdasarkan orientasi proses belajar mengajar, siswa harus ditempatkan sebagai subjek belajar yang sifatnya aktif dan melibatkan banyak faktor yang mempengaruhi, maka keseluruhan proses belajar mengajar yang harus dialami siswa dalam kerangka pendidikan di sekolah dapat dipandang sebagai suatu sistem yang mana sistem tersebut merupakan kesatuan dari berbagai komponen (input) yang saling berinteraksi (process) untuk menghasilkan sesuatu dengan tujuan yang telah ditetapkan (output).

Pengelolaan sarana dan prasarana sendiri sebagai faktor yang keberadaan dan penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Faktor-faktor ini diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan belajar yang telah dicanangkan. Sarana dan prasarana juga sering disebut sebagai alat pendidikan. Tidak sedikit yang menyebutkan pula sebagai fasilitas pendidikan. Sebenarnya, diantara istilah-istilah tersebut tidak ada perbedaan. Jadi, hanya berbeda penyebutannya saja. Artinya, sarana dan prasarana pendidikan dapt disebut juga sebagai faktor instrumental input atau alat pendidikan atau fasilitas pendidikan.

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (UU No. 20/2003, Bab I Pasal Ayat 20). Sementara itu tujuan pembelajaran akan tercapai jika faktor-faktor yang mempengaruhinya dioptimalkan secara efektif. Salah satu faktornya adalah pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Efektivitas proses pembelajaran akan berjalan dengan baik seiring dengan pengelolaan sarana dan prasarana didalam pendidikan itu sendiri, hal tersebut tidak terlepas dari bagaimana suatu komponen pendidikan terutama guru atau team yang ada pada suatu lembaga pendidikan dapat mengelola sarana dan prasarana yang sesuai dengan prosedur pengelolaan yang baik dan benar. Berdasarkan latar belakang penelitian, dan data yang telah diperoleh masih banyak kebutuhan sarana dan prasarana yang memang belum terpenuhi dan kurang memadai. Sehingga sekolah dituntut untuk mengupayakan sarana dan prasarana pendidikan untuk dapat mengimbangi sistem pendidikan itu sendiri, pola pikir dalam penelitian ini berfokus kearah pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi perencanaan, pengadaan, inventarisasi,penyimpanan, penataan,penggunaan,pemeliharaan,dan penghapusan untuk mengefektifkan proses pembelajaran. Dan dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dalam penelitian ini adalah proses pendayagunaan sarana dan prasarana sesuai dnegan prosedur pendiidkan dengan tujuan memberikan kontribusi yang berarti pada jalannya proses pendidikan dengan perencanaan,pengadaan,pendistribusian, Penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan sarana serta prasarana

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif pada proses pembelajaran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini dilakukan karena peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk melihat situasi dan kondisi bagaimana implementasi kebijakan pemenuhan sarana prasarana yang dilakukan di SMPN 3 Kepanjen.

Dengan demikian penelitian kualitatif tidak hanya sebagai upaya mendeskripsikan data tetapi deskriptif tersebut hasil dari pengumpulan data yang valid yaitu melalui wawamcara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Alat pengumpulan data atau instrument penelitian adalah peneliti sendiri yang langsung terjun ke lapangan (Moleong, 2007)

Penelitian ini menekankan pada proses pengumpulan data yang diamati oleh peneliti baik secara lisan maupun tulisan, memaknai data guna mengetahui polapola hubungan serta analisis mendalam sesuai dengan tujuan penelian. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif digunakan oleh peneliti dalam memperoleh hasil mengenai penjelasan dan pengertian yang mendalam dan menyeluruh tentang Implementasi Kebijakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dalam Menunjang Pembelajaran Siswa.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Sugiyono (2016:207) adalah batasan masalah dalam penelitian kualitatif yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Penetapan fokus dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang situasi yang akan diteliti. Selain itu, fokus telah mempermudah peneliti untuk mengetahui secara tepat terkait data yang ada di lapangan. Adapun fokus yang ada dalam penelitian ini adalah:

- Implementasi Kebijakan sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan oleh SMPN 3
 - a. Prosedur Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah
 - b. Aktor Pelaksana
 - c. Kesesuaian dengan standar-standar sarana dan prasarana sekolah yang telah ditetapkan
 - d. Pemenuhan Sarana dan Prasarana sekolah dalam menunjang pembelajaran
- Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan
 Pemenuhan Sarana dan Prasarana sekolah dalam menunjang
 pembelajaran siswa di SMP Negeri 3 Kepanjen
 - a. Faktor Pendukung

Melihat Faktor Pendukung dari pelaksanaan Implementasi Kebijakan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah dalam menunjang pembelajaran siswa yang terjadi di SMP Negeri 3 Kepanjen, baik dari pelaksana maupun penerima

b. Faktor Penghambat

Melihat Faktor Penghambat dari pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pemenuhan Sarana dan Prasarana sekolah dalam menunjang pembeljaran siswa yang terjadi di SMP Negeri 3 Kepanjen, baik dari pelaksana maupun dari penerima.

3.3 Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terhadap suatu objek untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Lokasi penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sebuah penelitian, hal ini dikarenakan lokasi penelitian dapat memberikan informasi terhadap peneliti tentang hal-hal yang diteliti. Lokasi penelitian pula yang memberikan data-data serta gambaran yang jelas terhadap objek yang diteliti, sehingga penelitian dapat dibuktikan keakuratannya. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Malang.

Adapun penetapan lokasi ini dipilih dengan pertimbangan Kabupaten Malang memiliki kinerja untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan karena menurut Dinas Pendidikan Kabupaten Malang masalah yang dihadapi dan sangat sulit yaitu dalam menunjang sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Kabupaten Malang sehingga peneliti ingin mengetahui lebih jelas dan mencari tahu apa yang menjadi penghambat dan tidak tersebarnya perbaikan sarana dan prasarana pendidikan secara rata.

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Situs penelitian

ditentukan dengan tujuan agar fokus penelitian tidak meluas. Adapun situs dari penelitian ini di SMPN 3 Kepanjen.

3.4 Jenis & Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, berikut adalah sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti berdasarkan sumber yang terdapat di lapangan. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sumber data utama dari data primer adalah bersumber dari informan. Informan adalah seseorang yang dianggappaham dan mengetahui secara benar tentang objek penelitian. Data yang diperoleh berupa argumen-argumen yang dilontarkan oleh informan yang bersifat objektif melalui tanya jawab berupa wawancara, sehingga nantinya akan memudahkan peneliti guna menghimpun informasi dan data-data untuk dikembangkan. Untuk mendapatkan informasi dan data-data empiris di lapangan, peneliti melakukan wawancara kepada informan yang dianggap paham dan mengetahui tentang pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dalam menunjang pembelajaran siswa.

Adapun sumber data primer yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara mengenai penjelasan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dalam menunjang pembelajaran siswa.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumeter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data ini diperoleh dengan menggunakan pengamatan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, data-data dari, SMPN 3 Kepanjen ,serta foto-foto dokumentasi untuk menunjang penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016: 224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah merupakan cara untuk mendapatkan informasi dalam teknik pengumpulan data yang dimana peneliti berhadapan langsung dengan informan atau narasumber untuk mencari informasi sesuai judul penelitian ini. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara terstruktur dengan adanya pedoman yang sudah dibuat untuk mempermudah arah dari tercapainya focus penelitian yang peneliti lakukan. Wawancara ini dilakukan dengan informan yang sudah dijelaskan dalam bagian sumber data yang dilaksanakan selam 1 (tsatu) bulan dan

dilakukan sebanyak 4 (kali) dengan jangka waktu wawancara selama 20 (dua puluh) menit setiap informannyadengan menyesuaikan waktu oprasional kerja instansi tersebut.

2. Observasi

Observasi adalah metode dalam pelaksana penelitian berupa pengamatan yang digunakan untuk memperoleh data dengan mengamati kegiatan, proses, serta prosedur dalam kebijakan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan menggunakan alat bantu pengamatan seperti kamera, buku catatan dan alat penunjang observasi lainya yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah Dalam Menunjang Pembelajaran Siswa. Penelitian ini berobsevasi di SMPN 3 Kepanjen, dalam kurun waktu selama 1 (satu) bulan serta dilakukan kunjungan sebanyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu seminggu di jam kerja dengan menyesuaikan waktu oprasinal kerja instansi tersebut

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses rekam jejak dari kegiatan penelitian yang peneliti lakukan, dalam pelaksanaan pencarian dokumentasi cara untuk memperoleh data dengan mempelajari, mencatat atau membuat salinan dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang berhubungan dengan objek atau permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan dokumetasi peneliti membagi dua cara untuk mendapatkan dokumentasi yang mendukung proses penelitian ini yaitu secara *online and offline*. Dengan artian dengan cara*online* dokumentasi didapatkan

dalam bentuk *softcopy* melalui situs atau web resmi yang bersangkutpautan dengan judul penelitian ini, sedangan dokumentasi secara *offline* didaptkan dalam bentuk *hardcopy* melalui dokumen-dokumen yang menunjang penelitian ini.

3.6 Intstrumen Penelitian

Instrumen Penelitian Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam sebuah penelitian. Sugiyono (2016:223) mengatakan bahwa instrumen penelitian dengan pendekatan kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan peran serta, namun peran penelitianlah yang sangat menentukan keseluruhan skenarionya. Dengan demikian yang dimaksud instrumen yang menggunakan pendekatan kualitatif adalah peneliti itu sendiri dan ditunjang dengan pencatatan dokumen dan pencatatan secara sistematik yang menggunakan alat bantu elektronik. Dalam penelitian ini, instrumen atau alat yang digunakan adalah:

- Peneliti sendiri, menurut Moleong (2004) salah satu ciri penelitian kualitatif adalah memasukkan manusia atau peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data utama. Peneliti dalam menyerap dan mengambil data di lapangan yaitu dengan mengamati fenomena-fenomena yang terjadi melalui observasi dan wawancara.
- 2. Pedoman wawancara (*Interview Guide*) yaitu berupa materi poin-poin yang menjadi dasar dan acuan dalam melakukan wawancara dengan informan. Hal ini berguna untuk

mengarahkan peneliti dalam mencari data-data yang diperlukan dalam penelitian. Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat pedoman wawancara untuk mengetahui data apa yang diginkan dan data apa yang dibutuhkan untuk penelitian ini, sehingga nantinya data-data ini dapat diperoleh dan diolah oleh peneliti.

3. Alat penanjang yaitu alat rekaman dan kamen untuk mengambil gambar melalu *Handphone* peneliti serta buku saku kecil yang digunakan untuk catatan penelitian Hal ini dilakukan untuk mendukung wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

3.7 Analisis Data

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak peneliti dan juga menjawab serta mengungkapkan fenomena sosial. Oleh karena itu dengan alasan tersebut maka peneliti harus mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh. Hal ini seperti yang disampaikan Bogdan dalam Sugiyono (2016:244):

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa data dilakukan dengan meogorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data dimulai dengan cara mempelajari dan menelaah data yang dikumpulkan, selanjutnya diadakan pengolahan dan interpretasi data yaitu dengan cara memakai model *before and after*. Dengan cara ini maka analisis data dilakukan dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan sesudah penelitian dilaksanakan dan kemudian diadakan evaluasi terhadap kondisi yang terjadi. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Berikut adalah penjelasan mengenai model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014:33):

1. Data Collection (Pengumpulan Data) Tahap ini merupakan aktivitas mengumpulkan data sesuai dengan jenis dan sifat data yang telah ditentukan sebelumnya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik yakni dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada kegiatan wawancara, peneliti menggunakan informan dari Kepala Sekolah , dan beberapa pihak lain yang dianggap mampu menunjang penelitian ini sehagai sumber pengumpulan data, sedangkan observasi dan dokumentasi dilakukan peneliti untuk dapat menguatkan data-data yang peneliti temukan melalui proses wawancara.

2. Data Condensation (Kondensasi Data)

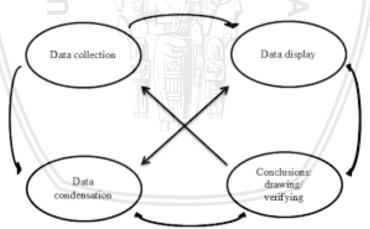
Tahap ini merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, membuat abstraksi, dan/atau merubah data yang telah ditemukan di lapangan berdasarkan catatan lapangan, hasil wawancara, dokumen-dokumen dan fakta empiris yang ada di lapangan.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Pada tahap ini dilakukan pengklasifikasian atau menyederhanakan kumpulan informasi yang didapat dari pengumpulan data sehingga memudahkan peneliti memahami makna dari suatu data yang telah didapat. Kemudian kegiatan ini dilanjutkan dengan penyederhanaan data yang didapat dari lapangan dan kemudian disajikan oleh peneliti. Tindakan dalam melakukan penyajian data ini didasarkan pada pemahaman peneliti terkait hal apa yang di teliti.

4. Drawing and Verifying Conclusion (Pengambilan Kesimpulan)

Dalam proses ini data yang telab dikondensasi serta dirangkaikan secara sistematis selanjutnya diambil kesimpulannya. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu kesimpulan yang berhubungan dengan fokus penelitian.



Gambar 3.1 : Komponen Analisi Data

Sumber: Matthew B. Miles, Huberman dan Saldana (2014:33)

3.8 Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan kegiatan pemeriksaan data secara cermat untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan (Moloeng, 2014:320). Kegiatan ini diperlukan untuk mengetahui kevalidan data yang diperoleh dari berbagai sumber data. Hal-hal yang peneliti gunakan dalam upaya untuk pengecekan keabsahan data sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triagnulasi sumber untuk mengkaji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Pengujian keabsahandata dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara,observasi, atau teknik lain dalm waktu/situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulangulang sehingga sampai ditemukan kapasitas datanya (Sugiyono,2007:127).

3. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mAengecek data sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misal data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Malang

Ketika kerajaan Singhasari dibawah kepemimpinan Akuwu Tunggul Ametung yang beristrikan Ken Dedes, kerajaan itu dibawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Pusat pemerintahan Singhasari saat itu berada di Tumapel. Baru setelah muncul Ken Arok yang kemudian membunuh Akuwu Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes, pusat kerajaan berpindah ke Malang, setelah berhasil mengalahkan Kerajaan Kediri. Kediri saat itu jatuh ke tangan Singhasari dan turun statusnya menjadi kadipaten.

Sementara Ken Arok mengangkat dirinya sebagai raja yang bergelar Prabu Kertarajasa Jayawardhana atau Dhandang Gendhis (1185-1222). Kerajaan ini mengalami jatuh bangun. Semasa kejayaan Mataram, kerajaan-kerajaan di Malang jatuh ke tangan Mataram, seperti halnya Kerajaan Majapahit. Sementara pemerintahan pun berpindah ke Demak disertai masuknya agama Islam yang dibawa oleh Wali Songo. Malang saat itu berada di bawah pemerintahan Adipati Ronggo Tohjiwo dan hanya berstatus kadipaten. Pada masa-masa keruntuhan itu, menurut Folklore, muncul pahlawan legendaris Raden Panji Pulongjiwo. Ia tertangkap prajurit Mataram di Desa Panggungrejo yang kini disebut Kepanjen (Kepanji-an).

Hancurnya kota Malang saat itu dikenal sebagai Malang Kutho Bedhah. Bukti-bukti lain yang hingga sekarang merupakan saksi bisu adalah nama-nama desa seperti Kanjeron, Balandit, Turen, Polowijen, Ketindan, Ngantang dan Mandaraka. Peninggalan sejarah berupa candi-candi merupakan bukti konkrit. Pada zaman VOC, Malang merupakan tempat strategis sebagai basis perlawanan seperti halnya perlawanan Trunojoyo (1674-1680) terhadap Mataram yang dibantu VOC. Menurut kisah, Trunojoyo tertangkap di Ngantang. Awal abad XIX ketika pemerintahan dipimpin oleh Gubernur Jenderal, Malang seperti halnya daerah-daerah di nusantara lainnya, dipimpin oleh Bupati.

Bupati Malang I adalah Raden Tumenggung Notodiningrat I yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan resolusi Gubernur Jenderal 9 Mei 1820 Nomor 8 Staatblad 1819 Nomor 16. Kabupaten Malang merupakan wilayah yang strategis pada masa pemerintahan kerajaan- kerajaan. Bukti-bukti yang lain, seperti beberapa prasasti yang ditemukan menunjukkan daerah ini telah ada sejak abad VIII dalam bentuk Kerajaan Singhasari dan beberapa kerajaan kecil lainnya seperti Kerajaan Kanjuruhan seperti yang tertulis dalam Prasasti Dinoyo. Prasasti itu menyebutkan peresmian tempat suci pada hari Jum`at Legi tanggal 1 Margasirsa 682 Saka, yang bila diperhitungkan berdasarkan kalender kabisat jatuh pada tanggal 28 Nopember 760. Tanggal inilah yang dijadikan patokan hari jadi Kabupaten Malang.

4.1.2 Arti Lambang Kabupaten Malang



Gambar 4.1 Lambang Kab.Malang

Sumber: MalangKab.go.id

- a. PERISAI SEGI LIMA dengan garis tepi tebal berwarna merah putih melambangkan jiwa nasional Bangsa Indonesia yang suci dan berani, dimana segala usaha ditujukan untuk kepentingan Nasional berlandaskan Falsafah Pancasila.
- b. Bintang dengan warna kuning emas adalah lambing Ketuhanan Yang Maha Esa, bersudut lima dan bersinar lima adalah melambangkan Pancasila merupakan Dasar dan Falsafah Negara yang senantiasa dijunjung tinggi dan selalu menyinari jiwa rakyatnya (dalam hal ini rakyat Jawa Timur) khususnya jiwa Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c. KUBAH dengan garis tepi atapnya berwarna kuning emas dan warna dasar hijau mencerminkan papan atau tempat bernaung bagi kehidupan rohani dan jasmani diruang lingkup Daerah Kabupaten Malang yang subur makmur.

- d. BINTANG BERSUDUT LIMA berwarna kuning emas, mencerminkan Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan Falsafah Pancasila yang luhur dan agung.
- e. UNTAIAN PADI berwarna kuning emas, Daun Kapas berwarna hijau serta Bunga Kapas berwarna putih mencerminkan tujuan masyarakat adil dan makmur.
- f. DAUN KAPAS berjumlah 17 (Tujuh Belas), BUNGA KAPASberjumlah 8 (Delapan), GELOMBANG LAUT berjumlah 45 (Empat Puluh Lima) mencerminkan semangat perjuangan Proklamasi 17 Agustus 1945.
- g. RANTAI berwarna kuning emas mencerminkan persatuan dan keadilan.
 Gunung Berapi berwarna hijau mencerminkan potensi alam daerah Kabupaten Malang.
- **h.** ASAP berwarna putih mencerminkan semangat yang tak pernah kunjung padam.
- i. LAUT mencerminkan kekayaan alam yang ada di daerah Kabupaten Malang sedangkan warna biru tua mencerminkan cita-cita yang abadi dan tak pernah padam.
- j. KERIS yang berwarna hitam dan putih mencerminkan jiwa kepahlawanan dan kemegahan sejarah daerah Kabupaten Malang.
- **k.** BUKU TERBUKA berwarna putih mencerminkan tujuan meningkatkan kecerdasan rakyat untuk kemajuan.

I. Sesanti SATATA GAMA KARTA RAHARJA mencerminkan masyarakat adil dan makmur, materiil dan spirituil disertai dasar kesucian yang langgeng (abadi).

4.1.3 Kondisi Geografis Kabupaten Malang



Gambar 4.2 Peta Kabupaten Malang.

Sumber: MalangKab.go.id

Secara administratif, Kabupaten Malang termasuk dalam wilayah Propinsi Jawa Timur. Secara geografis, terletak pada 112° 17′ 10,90″ sampai dengan 112° 57′ 00″ Bujur Timur dan 7° 44′ 55,11″ sampai dengan 8° 26′ 35,45″ Lintang Selatan. Batas

administratif Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

a. Sebelah utara : Kabupaten Jombang, Mojokerto dan Pasuruan

b. Sebelah selatan : Samudera Indonesia

c. Sebelah barat : Kabupaten Blitar dan Kediri

d. Sebelah timur : Kabupaten Lumajang dan Probolinggo
 Kabupaten Malang mencakup 33 kecamatan dengan luas wilayah keseluruhan
 3347,87 km². dikelilingi oleh gunung /pegunungan Arjuno, Anjasmoro, Kelud,
 Bromo, Semeru dan Tengger.

Kondisi iklim Kabupaten Malang menunjukan nilai kelembaban tertinggi adalah 90.74 % yang jatuh pada bulan Desember, sedangkan nilai kelembaban terendah jatuh pada bulan Mei, rata-rata berkisar pada 87.47 %. Suhu rata-rata 26.1 – 28.3 °C dengan suhu maksimal 32.29 °C dan minimum 24.22 °C. Rata-rata kecepatan angin di empat stasiun pengamat antara 1,8 sampai dengan 4,7 km/jam. Kecepatan angin terendah yakni berkisar pada 0.55 km/jam umumnya jatuh pada bulan Nopember dan tertinggi yakni 2.16 km/jam jatuh pada bulan September. Curah hujan rata-rata berkisar antara 1.800 – 3.000 mm per tahun, dengan hari hujan rata-rata antara 54 – 117 hari/tahun.

Topografi kabupaten Malang terdiri dari:

- a. Kelerengan 0-2% yang meliputi kecamatan Bululawang, Gondanglegi, Tajinan,
 Turen, Kepanjen, Pagelaran dan Pakisaji
- Kelerengan 2-15% yang meliputi kecamatan Singosari, Lawang, Karangploso,
 Dau, Pakis, bampit, Sumberpucung, Kromengan, Pagak, Kalipare, Donomulyo,
 Bantur, Ngajum dan Gedangan

Kelerengan 15-40% yang meliputi kecamatan Sumbermanjing Wetan, Wagir, dan Wonosari)

Dan kelerengan 40% meliputi kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembon, Poncokusumo, Jabung, Wajak, Ampelgading dan Tirtoyudo. Debit sumur umumnya bervariasi sesuai dengan kondisi geologi dan topografinya. daerah Iembah Brantas umumnya memiliki debit bervariasi antara 10-20 L/detik, meluas mengikuti lembah tersebut sampai ke Singosari. Ke arah timur, barat dan utara, potensi air bawah tanah menurun secara berangsur-angsur pada medan vulkanik sesuai dengan meningkatnya kemiringan Iereng dan meliputi daerahdaerah dengan ketinggian di atas sekitar 300-500 m yang potensi pengembanganpenyediaun air bersihnya sangat kecil.

Bagian selatan Kabupaten Malang, air bawah tanah didapat pada batugamping Pegunungan selatan. Akibat dalamnya muka airtanah dan permeabilitasnya yang terlokalisir, sumber-sumber air tersebut tampaknya sangat sulit dimanfaatkan menggunakan sumur bor.

Kabupaten Malang memiliki sumber mata air yang paling padat di Jawa Timur yakni sebanyak 684 sumber. Kebanyakan airnya dimanfaatkan untuk pengairan di dekat sumber atau mengalir ke saluran atau sungai menuju aliran dasar aliran utama sungai Brantas.

Kota-kota kecamatan di Kabupaten Malang umumnya terletak di daerah yang potensi air tanahnya terbatas dan sumber mata air merupakan bentuk penyediaan air bersih yang diharapkan. Karenanya, sumber mata air merupakan sumber air baku untuk air bersih yang disarankan untuk kota-kota kecamatan di Kabupaten Malang, kecuali Kota Poncokusumo yang disarankan menggunakan sumber sungai, karena

sumber mata air yang ada tidak memadai dalam memberikan penyediaan air bersih untuk daerah tersebut.

Pembagian kecamatan-kecamatan di seluruh Kabupaten Malang sesuai dengan kondisi dan karakteristik kegiatan dibedakan menjadi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Identifikasi kawasan perkotaan dan perdesaan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui dan menentukan jenis kegiatan yang akan ditentukan sehingga sesuai dengan peruntukan tanah dan ruangnya. Adapun luas wilayah per kecamatan dan jumlah kelurahan di Kabupaten Lamongan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.1, Jumlah Kecamatan di kab Malang

NO	KECAMATAN	NO	KECAMATAN
1	Ampelgading	18	Singosari
2	Bantur	- 19	Sumberpucung
3	Buluawang	20	Tajinan
4	Dampit	21	Karangploso
5	Dau	22	Kasembon
6	Donomulyo	23	Kepanjen
7	Gedangan	24	Kromengan
8	Gondanglegi	25	Lawang
9	Jabung	26	Ngajum
10	Kalipare	27	Ngantang
11	Pagak	28	Tirtoyudo
12	Pagelaran	29	Tumpang
13	Pakis	30	Turen
14	Pakisaji	31	Wagir
15	Poncokusomo	32	Wajak
16	Pujon	33	Wonosari
17	Sumbermanjing Wetan		

4.1.4 Kondisi Demografi Kabupaten Malang

Kabupaten Malang adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang terletak di Propinsi Jawa Timur dan merupakan Kabupaten yang terluas kedua wilayahnya setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten/ Kota yang ada di Jawa Timur. Hal ini didukung dengan luas wilayahnya 3.534,86 km² atau sama dengan 353.486 ha dan jumlah penduduknya 2.560.670 jiwa Menurut SUSENAS 2016 . Kabupaten Malang juga dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi diantaranya dari pertanian, perkebunan, tanaman obat keluarga dan lain sebagainya.

Disamping itu juga dikenal dengan obyek-obyek wisatanya. Beberapa kecamatan di Kabupaten Malang memiliki kepadatan yang tinggi diatas 2000 jiw/km2 adalah kecamatan Kepanjen, Pakis, dan Pakisaji. Sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan 1500-1999/km2 adalah kecamatan Turen, DAU, Sumberpucung, Pagelaran, dan Lawang. Selebihnya memiliki kepadatan dibawah 1500 Jiwa/km2. (Statistik Daerah Kabupaten Malang 2017).

4.1.5 Kondisi Pendidikan Kabupaten Malang

Dalam melihat suatu daerah bidang Pendidikan yang pasti akan disorot karena dengan dilihat segi Pendidikannya akan terlihat maju atau tidaknya suatu daerah. Salah satu aspek yang segogyanya mendapat perhatian utama dari setiap administrator pendidikan umumnya mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan seperti gedung, ruang belajar, kelas dan sebagainya.

	Sekolah (unit)	Murid (orang)	Guru (orang)
TK	1.8252	82.699	5.755
SD	1.502	238.309	15.029
SMP	503	96.231	21.649
SMA	131	32.456	8.119
	Guru/Sekolah	Murid/Sekolah	Murid/Guru
TK	3	45	14
SD	10	159	16
SMP	43	191	4
SMA	62	248	4

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Malang

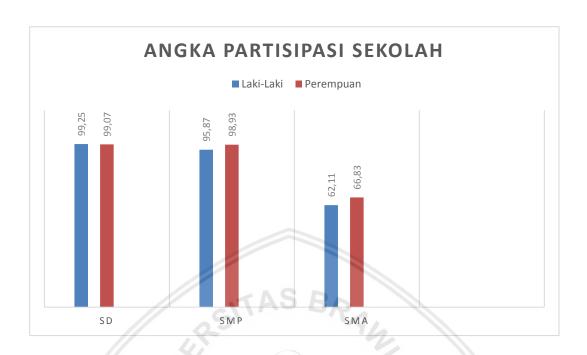
Tabel.4.2 Jumlah Sekolah, dan Guru Tahun 2016

Pada tabel tersebut, jumlah sekolah menengah baik dari tingkat pertama dan menegah berjumlah sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah Sekolah Dasar (SD). Jumlah murid sekolah menengah pertama ke atas ditahun 2016 adalah 128.687 orang sementara menurut Susenas 2016 penduduk dengan kelompok umur 13-18 Tahun di Kabupaten Malang adalah sebanyak 235.507 orang (Susenas 2016). Data tersebut menunjukan kecilnya jumlah penduduk dikelompok usia tertentu dapat ditampung di sekolah menengah. Mengacu pada salah satu Visi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yaitu meningkatkan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar maka mungkin peluang masyarakat untuk mengeyam pendidikan lebih tinggi dapat diperluas dengan menambah jumlah sekolah menengah di wilayah kabupaten malang terutama di daerah-daerah terpencil tentu saja dengan koordinasi provinsi jawa Timur

dikarenakan Sekolah Menengah Atas (SMA) sudah dipegang kendali oleh provinsi Jawa Timur.

Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Servei Angkatan Kerja (Sakernas), dan BPS Kabupaten Malang Sering dijumpai kenyataan ketika melakukan survei ke lapangan menemukan kelompok masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah (tidak melanjutkan ke SMP atau SMA). Disamping rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, alasan lain yang membuat mereka enggan melanjutkan pendidikan ke SMP atau SMA adalah karena sulitnya menjangkau lokasi SMP atau SMA yang letaknya jauh dari rumah. Jauhnya lokasi sekolah menengah dari rumah menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk transportasinya menjadi terlalu besar untuk ditanggung oleh rumah tangga terutama bagi yang tingkat ekonominya lemah.

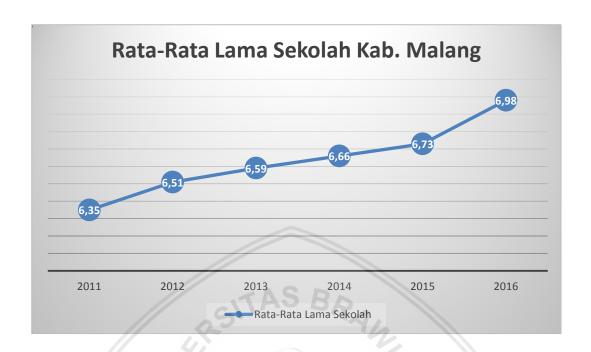
Permasalahan banyaknya penduduk yang tidak dapat melanjutkan sekolah karena lokasi sekolah yang jauh dari rumah tampaknya telah disadari sebagai permasalahan pendidikan menengah secara nasional seperti yang tercantum di salah satu strategic issue di Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Demikian juga dengan masalah keterjangkauan biaya dan terbatasnya daya tampung sekolah-sekolah menengah yang sudah ada sehingga tidak semua lulusan SD atau SMP dapat diterima di sekolah yang sudah ada.



Sumber: Survei Ekonomi Nasional (Susenas) 2016.

Tabel.4.4 Angka APS Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015

Angka Partisipasi (APS) SD pada Tahun 2016 sebesar 99,17 persen. Artinya dari 100 anak yang berusia sekolah SD, terdapat 99 anak masih belajar di sekolah dan ada 1 anak yang tidak pernah sekolah SD. APS SMP lebih rendah daripada APS SD, yaitu sebesar 97,39 persen, dan tercatat 2,61 persen sudah tidak sekolah lagi (putus sekolah). Selanjutnya APS SMA lebih kecil lagi hanya 64,36 persen dan 35,64 persen tidak sekolah lagi (putus sekolah) Dari segi gender dalam kesempatan memperoleh pendidikan, rupanya di Kabupaten Malang relatif masih seimbang antara laki-laki dan perempuan



Sumber: Survei Eknomi Nasional 2016

Tabel 4.5 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2011-2016

Dilihat dari tabel diatas, Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Malang hanya mengenyam pendidikan formal sekitar 7 sampai dengan 8 Tahun. Rendahnya tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas sumber daya manusia secara umum. Rendahnya pendidikan membuat daya saing yang rendah untuk memperoleh kesejahteraan hidup yang lebih baik. Pendidikan yang rendah juga diketahui memiliki dampak buruk terhadap kualitas hidup dan lingkungan. Tingkat pendidikan yang rendah sudah merupakan masalah nasional yang selalu menjadi titik perhatian dalam pembangunan. Karena sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar maka sumber daya manusia merupakan potensi yang jika dikembangkan dengan baik akan dapat memberi kontribusi positif yang besar terhadap kemajuan bangsa

4.2 Sejarah Berdirinya SMP Negeri 3 Kepanjen

SMP Negeri 3 Kepanjen merupakan salah satu dari lima SMPNegeri yang ada di Kecamatan Kepanjen (Sebagai Ib Kota Kabupaten Malang), beralamat di Desa Sukoraharjo Dukuh Ketapang, tepat dipinggir Jalan Raya Kota Malang- Kepanjen Lintas Timur. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1985 diatas lahan seluas 18.500 m2 dengan luas lahan terbangung 3.190 m2 dan lahan siap bangun 8.890 m2. Dengan luas lahan yang cukup representatif tersebut, menjadikan SMPN Negeri 3 Kepanjen sangat potensial untuk berkembang. Gedung sekolah tertata Rapi. Pola pembangunan 1:3 (gedung:lahan) yang berpatokan pada Master Plan Sekolah menjadikan lingkungan sekolah sangat mendukung proses pembelajaran dan pendidikan yang nyaman dan sehat. Lingkungan sosial sekitar masyarakat sekitar sekolah sangat agais yang didukung dengan keberadaan pondok pesantren yaitu: PPAI Ketapang yang sudah sangat terkenal dan berdiri sejak jaman kemerdekaan (500m arah selatan sekolah) dan PPAI AL-Karomah (1 km arah utara sekolah).

Pada awal berdi SMP Negeri 3 Kepanjen melakukan proses pembelajaran di SMP Negeri 4 Kepanjen. Baru setelah sekitar 1 Tahun Proses pembangunan gedung sekolah selesai maka proses belajar mengajar berpindah ke gedung baru SMP Negeri 3 Kepanjen di Desa Sukoraharjo.Sejak saat itu SMP Negeri 3 Kepanjen mengalami pergantian kepala sekolah sebagai berikut:

- 1. Bpk.Siswandojo (Alm) dari Tahun 1985-1991
- 2. Ibu Arliek Yunisasi dari Tahun 1991-1996
- 3. Bpk. Rahmad, Amd (Alm) dari Tahun 1996-2000

- 4. Ibu.Dra.Titiek Istyowati,M.Pd (Alm) dari Tahun 2000-2005
- 5. Drs.H.Suwari, M.Si dari Tahun 2003-2013
- 6. Drs.Sutrisno, M.Pd dari Tahun 2013-2015
- 7. Drs. Agus Bachtiyar dari Tahun 2015-2017
- 8. Drs.Supriyanto, M.Pd dari Tahun 2017- 2019
- 9. Ibu Dra. Durotul Bahgiyah, M. Pd Tahun 2019- Sekarang

4.2.1 Visi dan Misi SMP Negeri 3 Kepanjen

Visi

Mengembangkan siswa terdidik dalam peningkatan mutu, beriman,dan bertakwa, berbudi pekerti luhur,terampil, bertanggung jawab, sehat jasmani dan rohani.

Misi

- Mewujudkan perangkat kurikulum yang lengkap, mutakhir, relevan dengan kebutuhan dan berwawasan kedepan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki
- Mewujudkan pendidikan yang menghasilkan lulusan cerdas dan berkompetetif, terampil, beriman dan bertakwa serta berbudi pekerti luhur.
- 4. Mewujudkan kepramukaan yang terampil dan menjadi suri tauladan dalam bersikap.

- 5. Menumbuhkan kemampuan olah raga yang tangguh dan kompetetif
- 6. Menumbuhkan kemampuan seni yang mandiri dan kompetetif
- Menumbuhkan kemampuan KIR, lomba olimpiade yang cerdas dan kompetetif
- 8. Menumbuhkan semangat berkompeten, dedikasi tinggi dan disiplin dalam segala hal kepada seluruh warga sekolah
- 9. Menumbuhkan semangat budaya mutu secara intensif\
- 10. Mewujudkan fasilitas sekolah yang interaktif, relevan, mutakhir, dan berwawasan kedepan.
- 11. Mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman dan kondusif dalam bekerja dan berlajar
- 12. Mewujudkan pemenuhan berbasis sekolah yang tangguh
- 13. Mewujudkan organisasi sekolah yang terus belajar
- 14. Melaksanakan pemenuhan partisipatif sehingga terjalinnya hubungan yang harmonis antara warga sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitarnya.
- Mewujudkan kelembagaan sekolah yang bersih, sehat jasmani dan rohani.
- Mewujudkan pembiayaan pendidikan yang memadai, wajar, dan adil.
- 17. Mewujudkan sistem penilaian yang otentik.

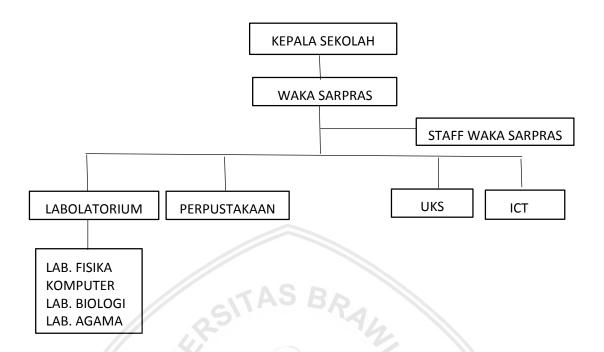
4.2.3 Tujuan SMP Negeri 3 Kepanjen

1. Terwujudnya pengembangan kurikulum yang adaptif dan produktif.

- 2. Terwujudnya proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan dinamis.
- 3. Terwujudnya lulusan yang cerdas dan kompetetif, beriman, dan bertaqwa serta berbudi pekerti luhur.
- 4. Berkompetetif dalam kegiatan keolahragaan, kesenian, olimpiade,dan KIR
- 5. Terwujudnya prasarana- sarana dan media pendidikan yang interaktif dan relevan.
- 6. Terwujudnya SDM dan tenaga kependidikan yang berkompeten, berdedikasi tinggi dan disiplin serta berwawasan selalu belajar
- 7. Terwujudnya pemenuhan sekolah yang tangguh.

4.2.4 Struktur Organisasi Bagian Sarana dan Prasarana SMP Negeri 3 Kepanjen

Untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara maksimal, efektif, dan efisien maka SMPN 3 Kepanjen perlu ditetapkan struktur organisasi bagian sarana dan prasarana yang merupakan struktur kerja terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar dan juga pengembangan sarana dan prasarana di SMP Negeri 3 Kepanjen



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Bagian Sarana dan Prasarana di SMP Negeri 3 Kepanjen

4.3 Penyajian Data dan Fokus Penelitian

4.3.1 Implementasi Kebijakan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah dalam menunjang pembelajaran siswa di SMP Negeri 3 Kepanjen

4.3.1.1 Prosedur Pemenuhan Sarana dan Prasarana sekolah di SMP Negeri 3 Kepanjen

Data penelitian tentang Implementasi Pemenuhan sarana dan prasarana Sekolah dalam menunjang Pembelajaran Siswa di SMP Negeri 3 Kepanjen diperoleh menggunakan instrumen pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah , dalam fokus yang pertama prosedur pemenuhan Sarana dan Prasarana yang ada di SMP Negeri 3 Kepanjen dari hasil wawancara penulis dengan Waka Sarana Prasarana Sekolah Ibu Mei Tri

menyatakan bahwa:

Handayani Spd, tidak lepas dari sistem pemenuhan Sarana dan Prasarana sekolah seperti: Perancanaan, Pengadaan, Pemeliharaan, Inventarisasi, dan Penghapusan Sarana dan Prasarana Sekolah. Berikut ini penyajian datanya:

1) Perencanaan Sarana dan Prasarana Program

Perencanaan sarana dan prasarana program di SMP Negeri 3 Kepanjen merupakan langkah kebutuhan sarana dan prasarana program yang akan dilaksanakan berdasarkan kondisi sarana dan prasarana yangdimiliki. Perencanaan sarana dan prasarana program melalui serangkaian tahapanyaitu rapat koordinasi sekolah,penetapan program sekolah,sertapenetapankebutuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk pelaksanaan program. Hasilpenelitian mengenai perencanaan sarana dan prasarana program di SMP Negeri 3 Kepanjen sebagai berikut.

a) Rapat Koordinasi Sekolah

Rapat koordinasi sekolah di SMP Negeri 3 Kepanjen merupakan rapat yang dilakukan pada awal semester untuk membahas program sekolah serta kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung program sekolah.Rapat koordinasi sekolah dihadiri oleh direksi sekolah, guru, dan staf tata usaha.Proses rapat koordinasi sekolah dipimpin oleh direksi sekolah kemudian guru danstaf tata usaha saling memberi masukan untuk mencapai kesepakatan programserta kebutuhan sarana dan prasarana pendukung program.Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah pada tanggal 23 Mei 2019, yang

"biasanya diawal semester kita ada pertemuan sekolah koordinasi satu sekolah, itu kan kita punya program-program, direksi sekolah memaparkan programnya, lalu nanti teman-teman guru dan karyawan ada yang memberi komentar termasuk sekaligus mengungkapkan kebutuhan apa yang diperlukan. Seperti misalnya tahun ini yang diminta teman-teman karena program kita mau buat perpustakaan kelas itu sarpras yang dibutuhkan adalah rak buku dikelas."

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Mei (Waka Sarpras) pada tanggal 15 Mei 2019, yang menyatakan bahwa"jadiadarapatkoordinasi sekolah membahas perencanaan sarana ini kemungkinan kita hanya apa yang sesuai kebutuhan, jadi kita punya program apa

Kemudian,hasil wawancara dengan Ibu Atim (guru)pada tanggal 20 Mei 2019, menyatakan bahwa "setiap awal semester kita melakukan pertemuan koordinasi sekolah nanti menetapkan program kemudian teman-teman guru dan karyawan memberi masukan sekaligus mengungkapkan kebutuhan, gitu."

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa rapat koordinasi sekolah di SMP Negeri 3 Kepanjen dilaksanakan diawal semester yang dihadiri oleh direksi sekolah, guru, dan staf tata usaha untuk membahas program sekolah, kebutuhan sarana dan prasarana terkait program sekolah.

b) Penetapan Program Sekolah

terus kemudian kebutuhan apa itu kita lengkapi."

Penetapan program sekolah di SMP Negeri 3 Kepanjen dilakukan pada saat rapat koordinasi sekolah diawal semester. Penetapan program sekolah merupakan

kesepakatan seluruh peserta rapat untuk program yang akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 3 Kepanjen. Proses penetapan program sekolah yaitu program sekolah disampaikan oleh direksi sekolah agar diberi masukan oleh guru, staf tata usaha sehingga diperoleh kesepakatan. Program terbaru SMP Negeri 3 Kepanjen yaitu perpustakaan kelas.

Penetapan kebutuhan sarana dan prasarana program di SMP Negeri 3 Kepanjen merupakan langkah menentukan kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung berjalannya program sekolah yang telah di sepakati. Penetapan kebutuhan sarana dan prasarana program dilakukan pada saat rapat koordinasi sekolah diawal semester, proses penetapan kebutuhan prasarana program berdasarkan masukan dari guru, staff tata usaha, dan kesepakatan bersama pada rapat awal semester, hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk Effendi Susanto (Guru) pada tanggal 23 Mei 2019, yang menyatakan bahwa

"kalau penetapan kebutuhan program ditentukan secara langsung pada rapat awal semester, untuk semester ini sesuai dengan kesepakatan programnya perpus kelas, jadi kebutuhannya rak buku untuk kelas, ada yang memakai rak lama, tapi tetap kita butuh rak baru. Jadi penetapan program dan kebutuhan programnya akan diprioritaskan."

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Dra. Durotul Baghdiyah M.pd (Kepala Sekolah) pada tanggal 23 Mei 2019 yang menyatakan bahwa:

" iya, disesuaikan dari program dulu. Jadi begitu ada program kemudian muncul kebutuhannya apa. Sebenarnya banyak sekali yang ingin kami rencanakan untuk pembangunan sarana dan prasarana lainnya karena bisa kita lihat sendiri masih banyak lahan yang kosong di dalam SMP Negeri 3 Kepanjen ini, sehingga kami disini ingin memanfaatkan lahan tersebut dengan menambah sarana dan prasarana sekolah untuk siswa kami."

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan kebutuhan sarana dan prasarana program di SMP Negeri 3 Kepanjen disesuaikan dengan program yang disepakati dan kondisi sarana dan prasarana yang ada agar mutu pendidikan dapat ditingkatkan secara terus-menerus.

2) Prosedur Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pengadaan Sarana dan prasarana pendidikan di SMP Negeri 3 Kepanjen terdapat pengadaan sarana dan prasarana program yang dilakukan berdasarkan keputusan rapat koordinasi diawal semester dengan menyesuaikan kebutuhan program sekolah.



Gambar 4.5 Form Pengadaan Sarana dan prasarana

Sumber: Dokumentasi waka sarpras SMPN 3 Kepanjen

a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Program

Pengadaan Sarana dan Prasarana Program di SMP Negeri 3 Kepanjen merupakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung berjalannya program sekolah. Pengadaan sarana dan prasarana program dilakukan menggunakan proposal pengadaan yang ditujukan kepada pemerintah dengan daftar kebutuhan dan rincian harga. Proses pengadaan Sarana dan Prasarana program dengan pengajuan proposal ke pemerintah, apabila proposal sarana dan prasarana disetujui oleh pemerintah maka sekolah akan menerima barang sesuai daftar kebutuhan.

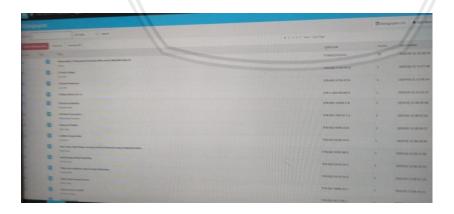
3) Prosedur Inventarisasi Sarana dan Prasarana Sekolah di SMP Negeri3 Kepanjen

Inventarisasi merupakan kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar barang-barang yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Barang inventarisasi sekolah adalah semua barang milik negara (yang dikuasai sekolah) baik yang diadakan/ dibeli melalui dana dari pemerintah, DPP maupun diperoleh sebagai penukaran, hadiah, atau hibah serta hasil usaha pembuatan sendiri di sekolah guna menunjang kelancaran proses belajar mengajar.

Inventarisasi/ pencatatan merupakan kegiatan permulaan yang dilakukan pada saat serah terima barang yang harus diselengarakan oleh pihak penerima. Inventarisasi dilakukan dalam rangka usaha penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap barang-barang milik negara maupun swasta. Inventarisasi juga

Kegiatan inventarisasi dilakukan dalam rangka usaha penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Tujuan inventarisasi yaitu guna untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah, untuk menghemat keuangan sekolah, baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah,sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk materil yang dapat dinilai dengan uang, dan yang terakhir yaitu untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Dalam hal ini Bpk. Effendy Susanto salah satu staff dari sarana dan prasarana sekolah mengatakan bahwa

" ya kita juga melakukan penginventarisasian setiap sarana dan prasarana yang ada, jadi sudah tertata rapi kode-kode barang tersebut sehingga kita tidak bingung gitu mbak." (Wawancara Pada tanggal 23 Mei 2019)



Gambar 4.6 Aplikasi pencatatan Kode Inventarisasi

Sumber: Dokumentasi Inventarisasi SMP Negeri 3 Kepanjen

Dari gambar diatas merupakan aplikasi yang digunakan untuk menginput kode inventarisasi yang ada di SMP Negeri 3 Kepanjen.

4) Prosedur Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah di SMP Negeri 3 Kepanjen

Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan sarana dan prasarana agar semua sarana dan prasarana tersebut selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidika. Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang. Sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap digunakan. Pemeliharaan juga merupakan upaya atau proses kegiatan untuk mempertahankan kondisi teknis, daya guna dan hasil guna suatu sarana dan memelihara. merehabilitasi prasarana kerja dengan jalan dan menyempurnakannya sehingga sarana dan prasarana tersebut dapat lebih tahan lama dalam pemakaian.

Pemeliharaan terhadap barang bergerak dilakukan sama seperti terhadap barang tidak bergerak yaitu pemeliharaan harian dan berkala, kecuali barang dalam persediaan, ia harus mudah diambil dan terlindung dari kerusakan. Pemeliharaan ini juga memiliki beberapa manfaat dalam pelaksanaannya. Karena, dengan adanya pemeliharaan sarana dan prasarana dapat terpelihara dengan baik, umurnya akan awet yang berarti tidak perlu mengadakan penggantian dalam waktu yang singkat, dapat meminimalisir biaya perbaikan

apabila terjadi kerusakan, sarana dan prasarana dapat terawat dengan baik sehingga menghindari kehiangan, dengan adanya pemeliharaan yang baik dan terawat juga dapat menunjang proses pembelajaran sehingga dapat memberikan hasil yang baik.

Pemeliharaan sangat berpengaruh penting dalam keadaan sarana dan prasarana di sekolah, seperti keadaan sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 3 Kepanjen juga memiliki prosedur pemeliharaan seperti yang disampaikan oleh Ibu Mei Tri selaku Waka Sarana dan Prasarana di SMP Negeri 3 Kepanjen yang mengatakan bahwa:

" jadi mbak, prosedur dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 3 Kepanjen memiliki prosedur yang berbeda untuk setiap bidangnya. Ada pemeliharaan yang berkala sesuai jenjang waktu, ada pemeliharaan yang dilakukan secara rutin atau setiap hari. Pemeliharaan yang berkala sesuai jengjang waktu biasanya sepert perawatan pada AC,LCD,Proyektor,sound, yang dilakukan selama 3 bulan sekai. Pengecekan terhadap peralatan-peralatan seperti meubeler, pengecekan pada tembok yang retak atau terkelupas, dan peralatan dalam kamar mandi. Pemeliharaan yang dilakukan secara rutinan dalam jangka waktu setiap hari yaitu biasanya perawatan yang dilakukan pada tanaman sekolah, kondisi halaman, kebersihan ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang labolatorium, ruang perpustakaan, uks, lapangan yang ada disekolah, kamar mandi dan lain sebagainya itu semua yang mendapatkan perawatan secara setiap hari. Untuk sarananya yaitu seperti peralatan papan tulis, spidol, penghapus, meja, kursi, komputer dan lain sebagainya kendaraan tentunya juga mendapatkan

perawatan secara setiap hari seperti mobil operasional sekolah, ambulance."
(Wawancara pada tanggal 23 Mei 2019)

Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tugasnya, yang nantinya juga akan ada sistem pelaporannya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Mei Tri, bahwasannya

"Pemeliharaan ini dilakukan sesuai dengan bidang apa yang ditangani mbak, misalnya untuk perawatan prasarana yang dilakukan setiap hari itu kami sudah menyediakan *cleaning service* Bhawikarsu untuk menangani perawatan di halaman sekolah, ruang kelas, ruang guru, ruang TU, ruang kepala sekolah, taman, kamar mandi, dan lain sebagainya. Untuk perawatan yang dilakukan di Ruang labolatorium, ruang perpustakaan, UKS, tersebut mendapatkan perawatan dari staff penjaga yang telah ditugaskan oleh pimpinan ruangan itu sendiri. Proses pelaporan dalam pemeliharaan yang dilakukan di SMP Negeri 3 Kepanjen yaitu dari penanggung jawab pelaksana kebersihan tersebut yang melakukan pengecekan dan mengisi form pemeliharaan dan lalu dilaporkan kepada wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana di SMP Negeri 3 Kepanjen." (Wawancara pada tanggal 18 Febuari 2019)

5) Prosedur Penghapusan Sarana dan Prasarana sekolah di SMP Negeri3 Kepanjen

Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana pendidikan dari pertanggung jawaban yang

berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih operasional penghapusan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana pendidikan dari daftar inventaris barang karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaraan sekolah. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Effendi Susanto selaku staff bidang Sarana dan Prasarana yang menyatakan bahwa

"Kalau untuk penghapusan di SMP Negeri 3 Kepanjen ini masih jarang atau hampir tidak pernah untuk dilakukan mbak, karena prosedurnya yang rumit. Jadi prosedur penghapusan yang ada di SMP Negeri 3 Kepanjen ini dari pihak sekolah bagian sarana dan prasarana, yang kebetulan saya sendiri yang menangani itu lalu mengajukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Malang diajukan lagi ke BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah). Dari BPKAD tersebut nanti dibentuk tim untuk dikirim ke sekolah, lalu dilakukan pengecekan, register, jumlah barang dan jika di ACC langsung bisa dilakukan penghapusan". (Wawancara pada tanggal 23 Mei 2019)

Penghapusan dilakukan bukan semata-mata ingin menghilangkan dan mengganti dengan yang baru namun ada syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penghapusan seperti yang di sampaikan oleh Pak Effendy Susanto yaitu:

"Untuk melakukan penghapusan di SMP Negeri 3 Kepanjen ini ada syaratnya mbak, yaitu seperti barang yang sudah rusak, barang yang memiliki biaya

perawatan yang lebih mahal dari operasionalnya, barang yang sudah habis nilai jangka waktu penggunaannya contoh misalnya seperti elektronik yang memiliki usia 5 tahun masa penggunaan". (Wawancara pada tanggal 23 Mei 2019)

Proses penghapusan sendiri beragam ada yang dari pelaksnaan pelelangan maupun pemusnahan. Pelelangan biasa dilakukan apabila barang tersebut masih layak pakai namun memiliki biaya perawatan yang lebih mahal dari penggunaan operasionalnya, dan apabila barang tersebut sudah habis nilai jangka waktunya sehingga harus dilaksanakan proses penghapusan. Dalam pelaksanaannya proses penghapusan yang ada di SMP Negeri 3 Kepanjen seperti dilansir oleh Pak Effendy Susanto, bahwa:

"Mengingat prosedur yang rumit dalam tahapan penghapusan maka kami tim sarana dan prasarana di SMP Negeri 3 Kepanjen belum pernah melaksanakan penghapusan berupa pemusnahan maupun pelelangan mbak. Kalau pelelangan menurut saya semua sekolah sama ya mbak, tidak pernah ada yang melakukan karena kalaupun ada yang melakukan ya dari tim BPKAD nya sendiri bukan dari sekolah langsung yang melakukan pelelangan, dan nanti biasanya dana dari hasil pelelangan tersebut langsug masuk di kas negara, bukan pendapatan sekolah. Untuk penghapusan dengan cara pemusnahan sebenarnya kami sudah pernah mengajukan tapi tidak pernah ada respon yang diberikan oleh dinas pendidikan cabang dinas pendidikan Kabupaten Malang mbak, dan ini juga masih jadi pembahasan apabila ada rapat-rapat yang diadakan oleh dinas pendidikan kepada sekolah". (Wawancara pada tanggal 23 Mei 2019)

Pelaksanaan penghapusan dengan cara pelelangan maupun pemusnahan sarana dan prasarana perlu untuk dilakukan karena untuk mencegah atau membatasi kerugian terhadap barang yang memerlukan dana besar dalam pemeliharaannya, mencegah terjadinya pemborosan biaya pengamanan yang tidak berguna lagi, membebaskan sekolah dari tanggung jawab pemeliharaan dan pengamanan, serta meringankan beban inventarisasi yang dilakukan di SMP Negeri 3 Kepanjen.

4.3.1.2 Aktor Pelaksana dan Penerima dalam Implementasi Kebijakan Pemenuhan Sarana dan Prasarana sekolah dalam menunjang pembelajaran siswa di SMP Negeri 3 Kepanjen

Dalam Implementasi Kebijakan Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 3 Kepanjen, terdapat aktor Pelaksana dan Penerima Implementasi dalam pemenuhan sarana dan prasarana, Aktor Pelaksana dalam Implentasi tersebut yaitu Komite Sekolah dan Wali Murid, sedangkan Penerima Implementasi tersebut yaitu Guru dan Siswa.Seperti yang disampaikan oleh Bapak Achmad Safi'i Selaku Komite Sekolah di SMP Negeri 3 kepanjen bahwasannya:

"Komite Sekolah sebagai organisasi mitra sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan sarana dan prasarana di sekolah. Kehadiran saya dan tim tidak selaku hanya menjadi stempel sekolah saja mbak,khususnya dalam hal memungut biaya dari orang tua siswa, namun kami harus dapat menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi khususnya memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di

SMP Negeri 3 Kepanjen agar siswa dapat menikmati fasilitas-fasilitas agar mampu meningkatkan pembelajaran siswa itu sendiri." (Wawancara pada tanggal 23 Mei 2019).

Hal tersebut diperkuat dengan wawancara penulis kepada wali murid dari siswa SMP Negeri 3 Kepanjen Ibu Sri Suhartini selaku Wali Murid dari Aditya Eka Putra Yulian Pratama kelas 9c

" ya mbak memang ada sumbangan atau iuran yang kita berikan dan di berikan informasi melalu rapat wali murid dan kita sebagai wali murid juga diberikan surat edaran, didalan surat tersebut juga ada rincian biaya-biaya dana pa saja yang akan di bangun mbak, kita selaku wali murid mendukung saja mbak, toh memang saya juga melihat di SMP Negeri 3 ini banyak sekali sarana dan prasarananya sehingga saya selaku wali murid sangat puas sekali melihatnya" (Wawancara pada tanggal 23 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa komite sekolah dan tim tidak semena-mena memungut biaya kepada wali murid siswa di SMP Negeri 3 Kepanjen guna memenuhi sarana dan prasarana sekolah yang ada di SMP Negeri 3 Kepanjen. Begitupun juga wali murid tidak keberatan dengan sumbangan tersebut karena memang dapat dilihat secara nyata jika sarana dan prasarana di SMP Negeri 3 Kepanjen sangat baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Guru dan Siswa sebagai penerima Implementasi Kebijakan Pemenuhan Sarana dan Prasarana di SMP

Negeri 3 Kepanjen, Ibu Atim selaku guru di SMP Negeri 3 Kepanjen yang mengatakan bahwa:

"Bagi saya sendiri yang sudah mengabdi sebagai guru di SMP Negeri 3 Kepanjen ini selama 8 tahun ya mbak, semua fasilitas sarana dan prasarana tentunya keseluruhan relatif bertambah baik, bertambah lengkap, namun hanya saja ada masalah-masalah kecil yang memang sering terabaikan ya mbak, lebih tepatnya lama dalam penanganannya dan memang karena luas SMP ini sangat luas banyak sekali lahan yang masih kosong dan masih memikirkan untuk dijadikan apa lagi." (Wawancara pada tanggal 23 Mei 2019)

Berdasarkan penjelasan diatas di dukung juga dengan pernyataan siswa di SMP Negeri 3 Kepanjen, Aditya Eka Putra Yulian Pratama kelas 9c yang mengatakan bahwa:

" Disini saya sudah mau 3 tahun ini mbak, iya mbak memang sarana dan prasarana disini lengkap mbak , lapangannya banyak ada lapangan basket, voli, sepak bola, badminton sendiri-sendiri, ruang lab, perpustakaan lengkap semua mbak disini, cuman disini saya selaku siswa putra masih kurang nyaman dengan kamar mandi putranya mbak, saya harap pihak sekolah memperbaiki kamar mandi putranya mbak"

Berdasarkan hasil wawancara diatas memang dapat disimpulkan bahwa Tim Sarana dan Prasarana yang ada di SMP Negeri 3 kepanjen sangat memanfaatkan lahan luas yang dimiliki oleh SMP Negeri 3 Kepanjen sesuai dengan manfaatnya untuk pembelajaran, walaupun masih ada lahan kosong yang

masih memikirkan untuk difungsikan apa lagi, dan disini dapat dilihat jika Guru dan Siswa menikmati sarana dan prasarana yang ada dengan baik walaupun ada permasalahan-permasalahan kecil.

4.3.1.3 Kesesuaian dengan standar-standar sarana prasarana sekolah yang telah ditetapkan dalam permendiknas No 24 Tahun 2007

Pendayagunaan sarana dan prasarana telah dituliskan dalam kebijakan Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana SMP/MTs yang menyatakan bahwa:

"Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Dan setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan,ruang kelas, ruang pimpinan,ruang pendidik,ruang tata usaha, ruang perpustakaan,ruang laboraturium, ruang kantin, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan."

Kebijakan ini merupakan acuan yang dimiliki dalam satuan pendidikan formal dalam menyediakan saran dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, social, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Sarana dan prasarana memiliki standarisasi pengelolaan yang baik. Pengelolaan tersebut terkait dengan

sumber daya yang terdapat disekolah. Pengelolaan tersebut digunakan untuk mencapai standar hasil yang tinggi.

Hal ini dapat disoroti pada SMP Negeri 3 Kepanjen yang sangat konsen terhadap sarana dan prasarana dalam rangka pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang bertujuan untuk memenhi sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 3 Kepanjen yang mengacu pada Permendiknas No 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana sebagaimana yang telah penulis tulis diatas, adapun kondisi sarana dan prasarana saat ini yang ada di SMP Negeri 3 Kepanjen yang termuat pada syarat rasio minimum kelengkapan sarana dan prasarana pada jenjang SMP/MTs, di SMP Negeri 3 Kepanjen memiliki:

Tabel 4.6 Prasrana yang ada di SMP Negeri 3 Kepanjen

Ruang Kepala	Perpustakaan	Ruang Rapat	Ruang BK
Sekolah			//
Ruang Guru	Koperasi Sekolah	Kantin	Tempat Sarpras
Ruang	Laboraturium	Kamar Mandi	Aula
Kurikulum	Fisika	Guru	
Ruang	Laboraturium	Kamar Mandi	UKS
Kesiswaan	Biologi	Perempuan (5)	
Ruang Sarpras	Laboraturium	Kamar Mandi	Lapangan
	Komputer	Laki-laki (3)	Basket, Voli,
			Sepak Bola,
			Badminton
Ruang ICT	Ruang	Ruang Osis	Musholla
	Ekstrakulikuler		

	Tempat Parkir	Ruang Pramuka	Dapur
Ruang Tata	Taman	Asrama Putri	Ruang Tata
Usaga		Voli	Tertib
Pendopo	Tempat Satpam	Kamar Mandi	Gudang
		Umum (2)	

Sumber : Buku Inventaris SMP Negeri 3 Kepanjen 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat jika di SMP Negeri 3 Kepanjen sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Permendiknas No 24 Tahun 2007 tentang ruangan apa saja yang harus dimiliki oleh SMP/Mts tersebut, data diatas diperkuat lagi oleh hasil wawancara saya dengan Ibu Dra. Durotul Baghiyah selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kepanjen mengatakan bahwa:

"SMP Negeri 3 Kepanjen ini memiliki luas total 18.500 m2 mbak, jadi sangat luas mbak, kita disini berupaya dengan luas lahan yang segitu luas kita dapat melengkapi sarana prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan bahkan jika memungkinkan kita dapat menambah sarana dan prasarana tersebut menjadi lebih lengkap lagi mbak" (Wawancara pada Tanggal 23 Mei 2019)

SMP Negeri 3 Kepanjen memang dengan luas lahan seperti diatas jika semua sudah memenuhi standar, tim waka sarpras terus memutar otak agar lahan kosong yang belum terpakai bisa menjadi sarana dan prasarana sekolah yang baru.

Tabel Inventaris diatas dan hasil wawancara dapat dilihat jika di SMP Negeri 3 Kepanjen memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh satuan pendidikan SMP/Mts menurut Permendiknas No 24 Tahun 2007 yang dapat kita lihat di tabel bawah inI

Tabel 4.7 Ketentuan Prasarana menurut Permendiknas No 24 Tahun 2007

Ruang Kelas	Ruang	Ruang
	Perpustakaan	Laboraturium IPA
Ruang Pimpinan	Ruang Guru	Ruang Tata Usaha
UKS	Ruang Konseling	Tempat Beribadah
Ruang Organisasi	Kamar Mandi	Gudang
Tempat Olahraga	Ruang Sirkulasi	Z

Dari Tabel diatas kita dapat melihat jika SMP Negeri 3 kepanjen Memiliki

Sumber: Permendiknas No 24 Tahun 2007

prasarana yang telah memenuhi standar prasarana yang ditetapkan oleh Permendiknas No 24 Tahun 2007, selain prasarana di SMP Negeri 3 Kepanjen sudah memenuhi standar dari Permendiknas No 24 Tahun 2007, tentu Tim Sarana dan Prasarana SMP Negeri 3 Kepanjen berupaya juga untuk melengkapi sarana yang ada, hal tersebut dapat diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan Waka Sarpras SMP Negeri 3 Kepanjen Ibu Mei Tri S.pd yang mengatakan bahwa "karena prasarana disini sangat lengkap tentu saya dan staaf sarana dan prasarana disini berupaya untuk melengkapi sarana yang ada, seperti halnya setiap kelas terdapat LCD, sehingga siswa tidak merasa bosan jika hanya diterangkan dengan membaca saja, karena kami disini sudah menggunakan ujian berbasis online

sehingga disini rata-rata semua siswa membawa laptop tapi kami disni juga menydiakan banyak computer jika siswa tersebut tidak memiliki laptop mbak, jadi kami memang berupaya tidak memberatkan siswa mbak, bnyak sarana lain yang menunjang prasarana disini mbak, kami berupaya untuk sesuai dengan standar-standar yang ada mbak." (wawancara pada tanggal 23 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas dapat diketahui jika di SMP Negeri 3 Kepanjen memiliki sarana dan prasarana yang telah sesuai dengan standarisasi dari Permendiknas no 24 Tahun 2007 yang telah ada sehingga dapat membuat siswa beserta guru-guru di SMP Negeri 3 Kepanjen dapat menikmati fasilitas sarana dan prasarana yang ada dengan baik.

4.3.1.4 Pemenuhan Sarana dan Prasarana sekolah untuk menunjang pembelajaran siswa

Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah sesuai harapan secara efektif dan efisien. Jika dikaitkan dengan pendidikan, pemenuhan sarana dan prasarana sekolah merupakan bagaiamana cara untuk memenuhi sarana dan prasarana sekolah yang telah direncanakan sebelumnya. Keterkaitan dalam penggunaan sarana dan prasarana ini yaitu bagaiamana adanya fasilitas sarana dan prasarana ini dapat digunakan semaksimal mungkin dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut Ibu Dr.a Durotul selaku kepala sekolah SMP Negeri 3 Kepanjen mangatakan , bahwa:

"Sarana dan Prasarana yang ada di SMP Negeri 3 Kepanjen ini sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran mbak, jadi kualitas sarana dan prasarana disini sangat amat diperhatikan karena sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 3 Kepanjen ini juga sudah berstandar SNP (Standaart Nasional Pendidikan), dengan ini sudsh dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana yang ada memiliki pengelolaan yang baik. Gini ya mbak pentingnya adanya sarana dan prasarana ini akan berfungsi untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran, jadi ya sebisa mungkin sekolah mengupayakan bagaimana agar fasilitas sarana dan prasarana yang ada dapat digunakan secara maksimal." (Wawancara pada tanggal 23 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Guru dan Siswa sebagai penerima Implementasi Kebijakan Pemenuhan Sarana dan Prasarana di SMP Negeri 3 Kepanjen, Ibu Atim selaku guru di SMP Negeri 3 Kepanjen yang mengatakan bahwa:

"Bagi saya sendiri yang sudah mengabdi sebagai guru di SMP Negeri 3 Kepanjen ini selama 8 tahun ya mbak, semua fasilitas sarana dan prasarana tentunya keseluruhan relatif bertambah baik, bertambah lengkap, namun hanya saja ada masalah-masalah kecil yang memang sering terabaikan ya mbak, lebih tepatnya lama dalam penanganannya dan memang karena luas SMP ini sangat luas banyak sekali lahan yang masih kosong dan masih memikirkan untuk dijadikan apa lagi." (Wawancara pada tanggal 23 Mei 2019)

Fasilitas Sarana dan Prasarana pendidikan yang ada di sekolah ditujukan memang untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran, sebagai media yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan ilmu kepada siswa. Proses pembelajaran pun juga tidak hanya dilakukan didalam kelas namun juga dapat dilaksanakan diluar kelas, tentunya dengan sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses pembelajaran siswa di SMP Negeri 3 Kepanjen. Hal tersebut diperkuat kembali oleh pernyataan Bapak Slamet Sumitro yang mengatakan bahwa:

"Dengan era sekarang ini ya mbak, guru-guru memang dituntut harus lebih kreatif dalam proses pembelajaran, karena siswa itu kan gamppang bosan ya mbak, sehingga guru memang dituntut kreatif dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada digunakan sebaik mungkin, contoh dengan adanya LCD di setiap kelas Guru dapat membuat pembelajaran dengan Power Point sehingga siswa dapat memahami dengan animasi-animasi power point yang dibuat sekreatifitas mungkin dan dengan adanya prasarana outdoor yang sangat banyak di SMP Negeri 3 Kepanjen ini, dapat juga digunakan untuk pembelajaran di luar kelas mbak, jadi memang di SMP Negeri 3 Kepanjen tidak hanya Ruang Kelas saja yang dibuat nyaman tetapi di luar kelas juga dibuat nyaman guna memang seperti yang mbak bilang tadi untuk menunjang pembelajaran siswa." (Wawancara pada tanggal 23 Mei 2019)

Berdasarkan dengan data di lapangan yang ada yaitu di SMP Negeri 3 Kepanjen, Pemenuhan Sarana dan Prasarana sekolah di SMP Negeri 3 Kepanjen sangat dijaga dan diupayakan sebaik dan senyaman mungkin, karena proses pembelajaran tidak hanya di dalam kelas saja tetapi juga di luar kelas sehingga Waka sarpras dan Tim sangat berupaya untuk membuat siswa dan warga sekolah nyaman dengan Sarana dan Prasarana yang baik. Hal Tersebut juga diperkuat dengan wawancara saya dengan siswa di SMP Negeri 3 Kepanjen Aditya Eka Putra kelas 9c yang mengatakan bahwa:

" sarana dan prasarana yang ada di SMP ini memang berpangaruh mbak kalau dengan pembelajaran, ya kalau misal saat ujian kan kita sudah elearning ya mbak jadi kalau saat ujian di sekolah tiba-tiba wifi mati gitu ya membuat kita jengkel mbak, terus disini memang suka peljaran diluar kelas mbak biar nggak cepat bosan." (Wawancara pada tanggal 23 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat jika memang siswa membenakan jika sarana dan prasarana sekolah berpengaruh ke proses pembelajaran mereka.

4.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah dalam menunjang pembelajaran siswa di SMP Negeri 3 Kepanjen

Dari penjabaran data hasil penelitian tentang pemenuhan sarana dan prasarana dalam mengoptimalkan proses pembelajaran di SMP Negeri 3 Kepanjen sangatlah bergantung dalam faktor yang mendukung pelaksanaan implementasi tersebut maupun faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi berdaarkan keterangan . Beberapa faktor-faktor tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

4.3.2.1 Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung Implementasi Kebijakan Pemenuhan Sarana dan Prasana Sekolah dalam menunjang pembelajaran siswa , yaitu terdapat beberapa penunjang didalam pelaksnaannya baik dalam proses implementasi kebijakan pemenuhan saranan dan prasarana berupa pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan dan penghapusan.

1)Sumber Dana

Sumber Dana masih saja menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan proses pemenuhan sarana dan prasarana. Karena dengan adanya dana pemenuhan sarana dan prasarana dapat berjalan dengan lancar, khususnya pada bagian pengadaan sarana dan prasarana, karena dalam proses pengadaan barang dana merupakan suatu poin penting yang utama dalam pelaksanaanya. Sumber dana yang digunakan dalam pengadaan sarana dan prasarana berasal dari 3 sumber, yaitu yang pertama dari SPP/ DPSMR (Dana Partisipasi dan Sumbangan Masyarakat Rutin), yang kedua dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dan yang ketiga dari SDIP (Sumbangan Dana Investasi Pendidikan) atau DPSMI (Dana Partisipasi dan Sumbangan Masyarakat Insidental) yang mana dibayarkan satu kali selama menjadi siswa. Dari dana tersebut merupakan sumber dana yang digunakan untuk mengadakan barang-barang sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 3 Kepanjen Seperti yang disampaikan oleh Ibu Mei Selaku Wakasek bagian Sarana dan Prasarana, yang mengatakan bahwa:

"Untuk faktor pendukung dalam pelaksanaan implementasi pemenuhan sarana dan prasarana ini ya soal dana mbak. Kalau dananya ada ya proses pengadaan

khususnya bisa berjalan dengan lancar mbak, barang-barang apa saja yang akan diadakan dapat terbeli. Namun tetap dalam skala prioritas, sarana dan prasarana apa saja yang dirasa lebih penting, akan diadakan atau dilakukan pembelian terlebih dahulu mbak, tapi kalau dananya memiliki sisa yang lebih maka semua barang yang akan diadakan dapat terbeli semua mbak sesuai kebutuhan." (Wawancara pada tanggal 23 Mei 2019)

Pemenuhan sarana dan prasarana dapat dilakukan selama dana yang digunakan masih ada, namun apabila dana yang digunakan untuk pengadaanbelum terkumpul semua maka tetap pemenuhan pengadaan menggunakan skala prioritas, mana yang lebih penting maka itu yang akan didahulukan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran di SMP Negeri 3 Kepanjen, dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar apabila sumber dananya terpenuhi. Karena sumber dana merupakan unsur utama yang terpenting dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam menunjang proses pembelajaran siswa.

2) Adanya Koordinasi yang baik

Faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah dalam menunjang pembelajaran siswa salah satunya terletak pada adanya koordinasi yang baik. Koordinasi dalam pelaksanaan memang sangat dibutuhkan khususnya oleh bagian wakil kepala sekolah sarana dan prasarana yang ada di

SMP Negeri 3 Kepanjen itu sendiri. Seperti yang disampaika oleh Ibu Durotul selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 3 Kepanjen yang mengatakan bahwa:

"Faktor pendukung dalam pengelolaan sarana dan prasarana ini yaitu adanya koordinasi yang baik antara wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana kepada staff, maupun antara wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana kepada kepala sekolah. Jadi semua mau bekerja sesuai dengan *jobdesk* nya masing-masing yang telah ditetapkan. Jadi tugas saya disini hanya memonitoring keberlangsungan pelaksanaannya saja mbak." (Wawancara pada tanggal 23 Mei 2019)

Koordinasi yang baik harus selalu dilakukan untuk menujang keberhasilan jalannya proses implementasi kebijakan pemenuhan sarana dan prasarana yang didalamnya sudah dijelaskan jika terdapat prosedur-prosedur yang ada didalam pemenuhan sarana dan prasarana sekolah seperti perencanaan, pengadaan, inventarisasi,pemeiharaan, dan penghapus. Dalam pemenuhan sarana dan prasarana sekolah memang tidak lepas dari prosedur tersebut guna dapat secara maksial mewujudkan sarana dan prasarana yang baik dan nyaman untuk proses pembelajaran siswa.

Koordinasi Wakil Kepala Sarana dan Prasarana sekolah dengan staaf sangat berpengaruh tetpi juga tidak lepas dari koordinasi antara komite sekolah dan wali murid, karena komite sekolah dan wali murid merupakan aktor pelaksana dari pemenuhan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Ibu Mei Tri yang mengatakan bahwa:

"Komite sekolah dan Wali murid sangat berpengaruh dalam pemenuhan sarana dan prasarana sekolah. Kita dapat mengetahui bahwa peran komite sekolah yaitu untuk memberikan pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator antara pemerintah, dan tentunya utuk wali murid sendiri juga berperan dalam mendukung pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan dan sumbangan yang diberikan tentu kita berupaya untuk memanffaatkan dana tersebut untuk memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang pembelajaran siswa."

b.Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah dalam menunjang pembelajaran siswa adalah terletak pada pada beberapa bagian, sebagai berikut:

1) Sumber Dana

Faktor penghambat yang terdapat pada kebijakan pemenuhan sarana dan prasarana salah satunya adalah dana. Dana dalam pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana ini masih saja menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapannya. Dikarenakan dana adalah patokan utama dan terpenting dalam pemenuhan sarana dan prasarana khususnya pada bagian pengadaan. Pengadaan sendiri memiliki faktor pendukung yang salah satunya yaitu sumber dana, dan itu juga sebagai faktor penghambatnya. Seperti yang di sampaikan oleh Ibu Mei Tri selaku wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana yang mengatakan, bahwa:

"Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana khususnya pada pengadaan ini ya tetap saja soal dana mbak. Kalau dana nya tidak ada ya maka proses pengadaan tidak dapat dilakukan. Penghambat dalam dana ini biasanya mengalami keterlambatan pada siswa mbak, ketika pembayaran sudah jatuh tempo namun masih saja diantara siswa tersebut ada yang belum membayarkannya jadi proses pengadaan sendiri terhambat karena ini, dan proses pengadaan akan diadakan berdasarkan skala prioritas, mana yang lebih penting penggunaannya yang akan didahulukan." (Wawancara pada tanggal 23Mei 2019)

Dana ini sebagai faktor penghambat hanya di bagian pengadaan sarana dan prasarana saja, karena didalam proses pengadaan adanya kegiatan membeli ataupun mengadakan barang apa saja yang akan digunakan. Keterlambatan dana yang dibayarkan oleh siswa dapat mempengaruhi keterhambatan proses pengadaan, dalam hal ini juga dirasakan oleh penerima implementasi, berikut seperti yang disampaikan oleh Ibu Atim Mulyani selaku guru yang mengajar di SMP Negeri 3 Kepanjen, yang mengatakan bahwa:

"Barang yang kami butuhkan untuk pembelajaran yang sekiranya barang tersebut memerlukan biaya yang lumayan ya tidak langsung dibelikan mbak, karena pembelian barang sarana dan prasarana disini juga memperhatikan prioritas kepentingannya, mana yang lebih penting maka itu yang didahulukan. Faktornya sih ya karena dana nya tidak ada mbak, jadi ya memperhambat juga. Tapi, kalau untuk barang-barang kecil seperti spidol, penghapus, dan lain sebagainya itu bisa langsung dibelikan tapi juga biasanya sekolah sudah menyediakan gitu mbak untuk cadangannya." (Wawancara pada tanggal 20Mei2019)

BRAWIJAYA

2) Pelayanan yang lama

Faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pemenuhan sarana dan prasarana dalam menunjang proses pembelajaran terdapat pada penanganan pelayanan yang lama baik dari eksternal sekolah maupun dari internal sekolah. Pelayanan lama yang ada di lingkup eksternal sekolah lebih ke pada proses penghapusan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Pada dasarnya proses penghapusan merupakan pelepasan tanggung jawab pihak sekolah terhadap barang sarana dan prasarana yang sudah tidak bisa digunakan lagi di sekolah. Namun, pada kenyataannya proses penghapusan sarana dan prasarana yang sudah tidak terpakai di SMP Negeri 3 Kepanjen mengalami penghambatan dalam pelayanannya, seperti yang disampaikan oleh Pak Effendy Susanto selaku staff bagian sarana dan prasarana yang mengatakan, bahwa:

"Faktor penghambat yang sering terjadi sih di proses penghapusan ya mbak, karena di penghapusan ini harus melalui prosedur yang sangat rumit. Salah satu penyebabnya ya karena pelaksanaan penghapusannya bukan dari sekolah ini sendiri mbak, melainkan dari pihak luar yaitu dari pihak sekolah bagian sarana dan prasarana, lalu mengajukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, diajukan lagi ke BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) . Dari BPKAD tersebut nanti dibentuk tim untuk dikirim ke sekolah, lalu dilakukan pengecekan, register, jumlah barang dan jika di ACC langsung bisa dilakukan penghapusan. Nah permasalahannya itu tidak ada tanggapan dari pihak dinasnya mbak, dan ini juga masih akan dijadikan pembahasan ketika ada rapat selanjutnya." (Wawancara pada tanggal 23 Mei 2019)

Sampai saat ini pelayanan pada proses penghapusan masih saja menjadi faktor penghambat karena pelaksanaannya tidak bisa dilakukan sendiri oleh sekolah. Tidak bisa dilakukan oleh sekolah karena dalam pengadaan barang sarana dan prasarana ini ada yang meggunakan dana dari pemerintah sehingga harus disertakan dengan bukti laporan. Jadi apabila ada barang yang yang sudah tidak bisa dipakai hanya diletakkan saja di gudang yang telah disediakan olehsekolah. Sedangkan faktor penghambat dari lingkup internal sekolah yaitu pelayanan yang diberikan untuk menunjang proses pembelajaran. Seperti yang dikatakan oleh ibu Sulikatin selaku guru yang mengajar di SMP Negeri 3 Kepanjen, yang mengatakan:

"Untuk sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 3 Kepanjen secara keseluruhan semakin membaik, dan semakin lengkap mbak. Namun, hanya saja ada beberapa yang masih kurang misalnya di beberapa kelas ada yang bocor, temboknya sudah retak namun hanya di beberapa kelas saja, dan itu penangannanya yang bisa dikatakan cukup lama mbak untuk perbaikannya. Kasus selanjutnya yang sering terjadi itu ya seperti ke rusakan LCD, yang selalu menjadi hambatan ketika proses pembelajaran. Untuk penanganan dalam hal ini juga tidak selalu cepat proses pelayanannya mbak. Kalau memang barangnya yang dibutuhkan ada maka proses penanganannya juga cepat. Namun, apabila tidak maka dapat memperhambat dalam proses pembelajarannya, bisa juga mengharuskan untuk pindah kelas apabila LCD dan proyektornya tidak bisa digunakan." (Wawancara pada tanggal 23 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dan pernyataan diatas dalam faktor penghambat implementasi kebijakan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah dalam menunjang proses pembelajaran siswa di SMP Negeri 3 Kepanjen ini terletak pada pelayanan nya yang lama, baik dari pelayanan di lingkup internal sekolah, maupun pelayanan di lingkup eksternal sekolah. Pelayanannya dapat dikatakan sebagai faktor penghambat karena proses penangannya yang tidak cepat untuk dilakukan.

4.3.3 Analisis Data

4.3.3.1 Implementasi Kebijakan Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam menunjang pembelajaran siswa di SMP Negeri 3 Kepanjen

1) Standar dan sasaran Implementasi Kebijakan/Ukuran

Salah satu variabel yang dingkapkan oleh Van Meter dan Van Horn (Winarno,2016:142) dalam menguraikan proses-proses implementasi kebijakan yaitu ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan. Identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran—ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran dasar dan tujuan-tujuan dari Implementasi Kebijakan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah Dalam Menunjang Pembelajaran Siswa di SMPN 3 Kepanjen yaitu terlaksananya standar-standar sarana dan Prasarana sekolah yang tealah ditetapkan dalam Permendiknas No 24 Tahun 2007 dan dijalankan di SMPN 3 Kepanjen.

Beberapa kesulitan besar untuk mengidentifikasi dan mengukur kinerja masih sering terjadi, ada dua penyebab kesulitan identifikasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn untuk menjawab mengapa hal ini terjadi. Pertama, mungkin disebabkan oleh bidang program yang terlalu luas dan sifat tujuan yang kompleks. Kedua, mungkin akibat dari kekaburan-kekaburan dan kontradiksi-kontradiksi dalam pernyataan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan. SMPN 3 Kepanjen sejauh ini sudah merealisasikan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan Implementasi Kebijakan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah dalam Menunjang Pembelajaran Siswa dengan sangat baik, tidak ditemukan kesulitan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, Sejak awal Pelaksanaan kebijakan hingga saat ini masih belum ditemukan kesulitan besar untuk mengidentifikasi dan mengukur kinerja, karena standar-standar yang dilaksanakan sudah kompleks.

SMPN 3 Kepanjen menerapkan standar-standar sarana dan prasarana sekolah yang telah ditetapkan di Permendiknas No.24 Tahun 2007, dengan luas lahan yang segitu lebar SMPN 3 Kepanjen mampu membangun beberapa sarana dan prasarana sekolah yang mampu menunjang pembelajaran siswa, dengan standar-standar yang telah tercantum dalam Permendiknas No 24 Tahun 2007, SMPN 3 Kepanjen mampu memenuhi standar tersebut. Dalam menunjang Pembelajaran Siswa dapat dilihat dari untuk kelas 7 sampai kelas 8 prestasi siswanya terus meningkat setiap Tahunnya dan untuk UNBK kelas 9 pada tahun 2017 peringkat 10 di Kabupaten Malang, Tahun 2018 peringkat 9 di Kabupaten Malang, dan pada Tahun 2019 peringkat 8 di Kabupaten Malang.

Penerapan standar-standar yang dilakukan, SMPN 3 Kepanjen menerapkan dengan prosedur-prosedur seperti perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah dalam memenuhi sarana dan prasarana sekolah

Dari analisis peneliti tersebut dapat disimpulkan bahwa ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan dari Implementasi Kebijakan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah dalam Menunjang Pembelajaran Siswa di SMPN 3 Kepanjen sudah terealisasikan dengan baik. Proses pelaksanaannya juga tidak ada kesulitan dalam mengidentifikasi kinerja karena standar kinerja telah jelas dan spesifik

2) Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah dalam Menunjang Pembelajaran Siswa di SMP Negeri 3 Kepanjen

Sumber-sumber kebijakan layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Terdapat beberapa sumber-sumber yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan yaitu ketersediaan dana, SDM (Sumber Daya Manusia), dan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara kebijakan. Terkait dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah di SMPN 3 Kepanjen. Sumber dana yang digunakan dalam pengadaan sarana dan prasarana berasal dari 3 sumber, yaitu yang pertama dari SPP/ DPSMR (Dana Partisipasi dan Sumbangan Masyarakat Rutin), yang kedua dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dan yang ketiga dari SDIP (Sumbangan Dana Investasi Pendidikan) atau DPSMI (Dana Partisipasi dan Sumbangan Masyarakat Insidental) yang mana

BRAWIJAY

dibayarkan satu kali selama menjadi siswa. Dari dana tersebut merupakan sumber dana yang digunakan untuk mengadakan barang-barang sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 3 Kepanjen.

Selain sumber dana yang paling krusial dan yang paling wajib untuk diperhatikan yaitu mengenai SDM (Sumber Daya Manusia). Tersedianya SDM yang cukup namun tanpa diimbangi pembagian kerja yang bagus tentu tidak akan memperlancar jalannya implementasi kebijakan. Maka dari itu perlu penempatan orang-orang pada bidang-bidang agar terciptanya spesialisasi yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah di SMPN 3 Kepanjen telah terbentuk sebuah tim yang menangani masalah sarana dan prasarana sekolah sebagai sumber daya manusia yang dikerahkan yaitu Wakasek Bagian Sarana dan Prasarana Sekolah bersama tim Bapak dan Ibu Guru lainnya serta komite sekolah. Selain itu orang tua wali murid juga menjadi Sumber Daya Manusia

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber Implementasi Kebijakan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah di SMPN 3 Kepanjen sudah berjalan dengan baik. Dana yang diterima dari pemerintah telah digunakan dengan sebagaimana mestinya, kemudian sekolah juga memiliki tim-tim khusus sesuai dengan spesialisasi pada bidangnya masing-masing.

BRAWIJAYA

3) Komunikasi Antara Organisasi Terkait dengan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno 2016:144) prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut. Komunikasi di dalam dan diantara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Untuk meneruskan pesan-pesan ke bawah dalam suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpangkannya menyebarluaskannya, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Jika sumber-sumber informasi yang berbeda memberikan intrepetasi-intrepetasi yang tidak konsisten terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan atau jika sumber-sumber yang sama memberikan intrepetasi-intrepetasi yang bertentangan, para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud-maksud kebijakan.

Komunikasi dalam konteks penelitian ini digunakan agar pelaksanaan kebijakan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah di SMPN 3 Kepanjen berjalan dengan baik. Komunikasi ini dilakukan dengan adanya rapat Koordinasi yang dilakukan oleh Waka Sarpras dan Tim, Kepala Sekolah, Komite Sekolah serta beberapa Bapak dan Ibu Guru SMPN 3 Kepanjen yang dijuluki dengan rapay koordinasi Internal untuk menentukan dalam perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah dari barang apa saja, dana, maupun tujuan atau manfaatnya, jika

sudah diputuskan hasil koordinasi internal tersebut maka pihak sekolah akan mengadakan rapat Eksternal yaitu dengan Wali Murid SMPN 3 Kepanjen.

Peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh berbagai pihak sudah terlaksana dengan baik dan efektif. Terlebihnya komunikasi yang dilakukan lebih mengutamanakan koordinasi bersama yang hasil keputusannya dihaslkan secara bersama. Sejauh ini belum ditemukan kesulitan dan kesalah pahaman dalam penyampaian informasi baik dari pihak pusat ke sekolah maupun di SMPN 3 Kepanjen, karena informasi yang disampaikan sudah jelas,tepat, dan konsisten sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

4) Karakteristik SMP Negeri 3 Kepanjen

Van Meter dan Van Horn dalam (Winarno 2016:145) mengetengahkan beberapa unsur yang berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan, yang pertama yaitu kompetensi dan ukuran staff suatu badan pelaksana. Sebagai pelaku implementasi kebijakan, yang pertama yaitu kompetensi dan ukuran staff suatu badan pelaksana. Sebagai pelaku implementasi kebijakan harus memiliki kompetensi dan kekuatan jika pelaksana tidak memiliki suatu potensi atau kekuatan jika pelaksana tidak memiliki suatu potensi atau kekuatan maka tidak dapat terlaksananya kebijakan tersebut, kemudian yang kedua yaitu jaringan kerja komunikasi dengan individu-individu diluar badan pelaksana.

SMP Negeri 3 Kepanjen sudah mampu menerapkan standar-standar yang telah diatur dalam Permendiknas No 24 Tahun 2007 dan mampu untuk menambah sarana dan prasarana dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong dengan terdapat

manfaatnya didalamnya dan sarana dan prasarana yang telah dibangun mampu menunjang pembelajaran siswa baik akademik maupun non akedemik karena untuk akademiknya prestasi siswa meningkat setia Tahunnya dan di bagian Non Akademik Sarana dan Prasarana yang mendukung banyak sekali siswa-sisiwi SMPN 3 Kepanjen mampu mencetak prestasi dengan kejuaran seperti Bola Voli, Bola Basket dan Sepak Bola.

Dapat disimpulkan bahwa SMPN 3 Kepanjen sebagai pelaku Implementasi Kebijakan telah memiliki karakteristik yang baik dengan dilihat dari sisi prestasi-prestasi siswa. Maka dapat dikatakan sekolah ini memiliki kekuatan dan potensi untuk menerima dan menjalankan sebuah kebijkan yang telah dibuat. Sejauh ini setiap Tahun siswa-siswi SMPN 3 Kepanjen selalu meraih prestasi baik akademik maupun non akademik.

5) Kondisi Ekonomi dan Sosial dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah dalam Menunjang Pembelajaran Siswa di SMP Negeri 3 Kepanjen

Kondisi-kondisi ekonomi dan sosial merupakan variabel selanjutnya yang ditentukan oleh Van Meter dan Van Horn. Perlu mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijkaan karena menurut Van Meter dan Van Horn, faktor-faktor inii mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana. Pengaruh Implementasi kebijakan terhadap pencapaian badan-badan pelaksana. Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap kondisi Ekonomi dan Sosial yang berkaitan dengan Implementasi

Kebijakan Pemenuhan Sarana dan Prasarana sekolah dalam menunjang pembelajaran siswa di SMPN 3 Kepanjen sangat positif.

Setelah terlaksananya kebijakan tersebut, dampak sosial yang dirasakan oleh pihak SMPN 3 Kepanjen yaitu merasa semakin banyak orang tua calon wali murid mempercayakan sekolah SMP untuk anaknya di SMPN 3 Kepanjen, setiap tahun jumlah siswa semakin bertambah saat pendaftaran peserta didik baru dan sekaligus mengembangkan sayap untuk menunjukkan ke lingkungan sekitar bahwa SMPN 3 Kepanjen sudah mampu berkembang.

Pengaruh Ekonominya, SMPN 3 Kepanjen memiliki Aula yang dapat dipergunakan masayarakat sekitar untuk acara dengan memberikan sejumlah kontribusi, kontribusi tersebut diolah oleh SMPN 3 Kepanjen untuk memenuhi, menambah ataupun memperbaiki sarana dan prasarana sekolah, kontribusi tersebut dapt menjadi income bagi SMPN 3 Kepanjen. Pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dirasakan oleh Implementator yaitu Waka Sarpras dan tim dengan adanya tambahan dana dapat memanfaatkan lahan kosong dengan menambah sarana dan prasarana guna menunjang pembelajaran siswa.

6) Kecenderungan Pelaksana (*Implementators*) dalam Implementasi Kebijakan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah dalam Menunjang Pembelajaran Siswa di SMPN 3 Kepanjen

Arah kecenderungan-kecenderungan pelaksana terhadap ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Van meter dan Van Horn berpendapat bahwa setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui presepsi-presepsi pelaksana dalam yuridiksi di

mana kebijakan tersebut dihasilkan. Mereka kemudian mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin memengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni : kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu.

Pengetahuan pemahaman dan pelaksana terutama Waka Sarana dan Prasarana bersama Tim selaku implementator yang paling berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah dalam Menunjang Pembelajaran Siswa di SMPN 3 Kepanjen. Disini Waka Sarpras dan tim berupaya untuk dapat memenuhi sarana dan prasarana sekolah agar mampu meningkatkan pembelajaran siswa. Siswa SMPN 3 Kepanjen juga merasa jika sarana dan prasarana sekolah mampu meningkatkan pembelajaran siswa, karena pelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja tetapi biasanya dilakukan di luar ruang kelas, sehingga dengan adanya sarana dan prasarana outdoor yang mampu memberi kenyamanan untuk siswa, siswa dapat merasa nyaman dalam pembelajaran walupun diluar kelas.

Dapat disimpulkan bahwa dalam Implementasi Kebijakan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah dalam Menunjang Pembelajaran Siswa di SMPN 3 Kepanjen secara pemahaman dan pengetahuan terkait kebijakan sangat berepngaruh dalam penerapan kebijakan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn bahwa intesitas kecenderungan-kecenderungan pelaksana akan memengaruhi kinerja kebijakan. Selain itu, tingkah laku yang

kurang kuat mungkin menyebabkan para pelaksana mengalihkan perhatian dan mengelak secara sembunyi-sembunyi.

4.3.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah Dalam Menunjang Pembelajaran Siswa

1) Faktor Pendukung

1)Sumber Dana

Sumber dana ini marupakan langkah awal yang digunakan dalam proses pelaksanaan pemenuhan sarana prasarana baik berupa pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan. Namun, diantara semua proses pemenuhan sarana dan prasarana sumber dana ini lebih condong ke dalam proses pengadaan, karena didalamnya terdapat kegiatan pembelian sarana. Sumber dana yang digunakan dalam pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana ini berasal dari 3 sumber. Apabila dari 3 sumber dana tersebut sejak awal dapat terpenuhi dengan mudah dan lengkap maka proses pemenuhan sarana prasarana khususnya pengadaan dapat dilaksanakan dengan baik.

Pelaksanaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah diadakannya menggunakan skala prioritas, barang mana yang lebih penting maka itu yang didahulukan sesuai dengan keadaan dananya juga, namun apabila dana yang digunakan masih tersisa maka pengadaan akan diadakan sesuai dengan kebutuhan yang ada sehingga tidak dapat menghambat proses pembelajaran. Berdasarkan hasil analisa diatas dapat disimpulkan bahwasannya sumber dana merupakan hal terpenting dalam

pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana khususnya dalam proses pengadaan, karena didalamnya terdapat proses pembelian barang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjnag proses pembelajaran. Banyak hal yang ttidak diinginkan dalam semua itu

2)Adanya Koordinasi yang baik

Koordinasi adalah komponen terpenting yang harus dilaukan untuk mendapatkan hasil terbaik dengan cara bekerja sama. Koordinasi dalam pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana memang sangat dibutuhkan baik di pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan. Apabilakoordinasi berjalan dengan baik antara sesama staf, koordinasi antar kepala bagian dengan staf, koordinasi antara kepala bagian dengan kepala sekolah berjalan dengan baik, maka proses pemenuhan sarana dan prasarana nya pun akan berjalan dengan baik pula.

Koordinasi yang terjadi pada proses pengadaan yaitu koodinasi yang terjadi antara bagian sarana dan prasarana dengan seluruh *stakeholder* koordinator seluruh ruangan yang ada di sekolah, antara staff sarana parasrana dengan mitra penjual barang-barang yang ada diluar sekolah, serta antara staaf dengan wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana untuk melaporkan sebagai pertanggung jawaban. Koordinasi yang terjadi pada proses inventarisasi yaitu antara staff inventarisasi dengan *stakeholder* setiap masing-masing ruangan, antara bagian sarana dan prasrana sekolah dengan bagian kantor dinas pendidikan kabupaten malang. Untuk koordinasi yang terjadi pada proses pemeliharan terdapat beberapa selain antara staff dengan wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana yaitu

BRAWIJAY

antara staff sarana dan prasarana dengantim kebersihan dari sekolah. Serta yang terakhir yaitu koordinasi yang terjadi pada prosedur penghapusan yaitu untuk koordinasi antara staff sarana dan prasarana memang masih cukup rumit dalam pelaksnaaannya.maka dari itu pelaksanaannya belum terjadi. Namun proses penghapusan yang dilakukan disetiap-setiap bagan yang ada disekolah seperti pada perpustkaan, uks, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil analisa diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya koordinasi yang baik maka proses pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana dapat berjalan dengan baik.

2) Faktor Penghambat

1)Sumber Dana

Sumber dana ini merupakan langkah awal yang digunakan dalam proses pelaksanaan pemenuhan sarana prasarana baik berupa pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan. Namun, diantara semua proses pemenuhan sarana dan prasarana dana ini lebih condong ke dalam proses pemenuhan pengadaan, karena didalamnya terdapat kegiatan pembelian sarana. Sumber dana yang digunakan dalam pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana ini berasal dari 3 sumber. Apabila dari 3 sumber dana tersebut sejak awal dapat terpenuhi dengan mudah dan lengkap maka proses pemenuhan sarana prasarana khususnya pengadaan dapat dilaksanakan dengan baik, namun apabila dalam pelaksanaannya dana masih saja sering tidak terkumpul sesuai mestinya, ada saja keterlambatan dana yang dibayarkan oleh siswa. Keterlambatan dana yang dibayarkan akan

BRAWIJAY

memperhambat pelaksanaan pengadaan sarana pendidikan. Karena dalam proses pemenuhan sarana prasarana pendidikan diperlukan juga proses pengadaan yang didalamnya terdapat proses pembelian menggunakan dana yang berasal dari 3 sumber tersebut.

Berdasarkan hasil analisa diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan proses sarana prasarana pendidikan khususnya pada proses pengadaan, memang memerlukan dana untuk proses pembeliannya, dan apabila dana yang ada tidak sesuai dengan anggaran maka dapat memperhambat proses pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.

2)Pelayanan Yang Lama

Pelayanan merupakan hal terpenting dalam pelaksanaan pemenuhan sarana prasarana pendidikan. Karena dalam pelaksanaannya sekolah tidak dapat berjalan sendiri dan jika dalam sekolah guru maupun siswa tidak dapat mengadakan keperluan barang untuk proses pendidikan sendiri. Pelayanan lama yang dirasakan berasal dari lingkup eksternal sekolah yaitu hubungan antara sekolah dengan pemerintah yang terhambat pada proses penghapusan sarana prasarana pendidikan. Dalam pelaksanaan penghapusan memiliki prosedur yang cukup rumit dan masih terhambat pada pemerintah dinas pendidikan kabupaten yang tidak mengirimkan tim penghapusan untuk menghapusakan sarana yang sudah rusak dan tidak bisa terpakai lagi. Proses penghapusan tidak bisa dilaksanakan sendiri karena mengingat dana yang digunakan dalam proses pemelian adalah dana dari pemerintah, jadi harus ada pelaporannya.

Sedangkan pelayanan yang berasal dari lingkup internal sekolah yaitu pelayanan yang diberikan untuk menunjang proses pembelajaran. Apabila dalam proses pembelajaran memerluan sarana penunjang misalnya pada proses pembelajaran LCD rusak dan lain sebagainya lalu pada saat proses penggantiannya tidak dapat langsung dilaksankan karena mengingat beberapa faktor sepeti anggaran dan waktu yang tidak mungkin langsung diadakan. Mungkin alternatifnya yaitu dalam proses pengadaan sarana harus dilebihkan jumlah sarana yang diperlukan agar tidak dapat mengganggu dalam proses pembelajaran. Karena pelaksanaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah diadakannya menggunakan skala prioritas, barang mana yang lebih penting maka itu yang didahulukan sesuai dengan keadaan dananya juga, namun apabila dana yang digunakan masih tersisa maka pengadaan akan diadakan sesuai dengan kebutuhan yang ada sehingga tidak dapat menghambat proses pembelajaran.

Berdasarkan hasil analisa diatas dapat disimpulkan bahwasannya sumber dana merupakan hal terpenting dalam pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana khususnya dalam proses pengadaan, karena didalamnya terdapat proses pembelian barang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjnag proses pembelajaran. Apabila dana terhambat maka proses pengadaan pun juga akan terhambat untuk menunjang proses pembelajaran tapi tidak mempengaruhi secara keseluruhan.

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN DAN DAN SARAN

- 5.1 Kesimpulan
- 5.1.1 Implementasi Kebijakan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah dalam menunjang pembelajaran siswa
- 5.1.1.1 Prosedur Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 3 Kepanjen
- 1) Prosedur Perencanaan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah di SMP Negeri 3 Kepanjen
 - a. menampung semua usulan perencanaan pemenuhan perlengkapan sekoah yang diajukan setiap unit kerja sekolah dan menginyestasikan kekurangan perlengkapan sekolah
 - b. menyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah untuk periode tertentu, misalnya untuk satu triwulan atau satu tahun ajaran.
 - c. Memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang telah tersedia sebelumnya. Dalam rangka itu perencana atau panitia mencari informasi tentang perlengkapan yang telah dimiliki oleh sekolah. Salah satu cara adalah dengan jalan membaca buku inventaris atau buku induk barang. Berdasarkan panduan tersebut lalu disusun rencana

BRAWIJAY

- kebutuhan perlengkapan, yaitu membuat daftar semua perlengkapan yang dibutuhkan di sekolah.
- d. Memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaransekolah yang telah tersedia. Apabila dana yang telah tersedia tidak tercukupi untuk pemenuhan kebutuhan ini maka perlu dilakukan seleksi terhadap semua kebutuhan perlengkapan yang telah direncanakan.
- e. Penetapan rencana pemenuhan sarana dan prasarana sekolah akhir.

2.) Prosedur Pengadaan Pemenuhan sarana dan prasarana di SMP Negeri 3 Kepanjen

- a. Proses pengadaan dapat dilakukan melaui dua prosedur, prosedur yang pertama yaitu dapat dilakukan secara tertulis yaitu dengan mengisi form, dan yang kedua dilakukan secara tidak tertulis yaitu secara lisan dan biasanya dilakukan apabila meminta proses pengadaan yang memiliki nilai barang yang kecil.
- b. Proses pengadaan dilakukan melalui koordinator ruangan kepada wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana maupun staff dari sarana dan prasarana. Melalui prosedur yang mana pencatatn kebutuhan pengadaan disetiap ruangan yang dilakukan oleh pengurus setiap ruangan yang kemudian dilaporkan kepada kepala koordinator bagian ruangan tersebut,

dan kemudian oleh kepala koordinator ruangan mnyampaikan sarana apa saja yang perlu diadakan kepada staff maupun wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana.

7) Prosedur Inventarisasi pemenuhan sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 3 Kepanjen

- a. Prosedur inventarisasi merupakan pemberian kode pada setiap sarana yang baru saja diadakan, dan penomoran tersebut dicatat sesuai dengan pedoman yang ada. Maka dari itu prosedur inventarisasi atau pemberian kode antara sarana dan prasarana berbeda dengan pemberian kode terhadap sarana belajar siswa yaitu buku, terutama inventarisasi pada perpustakaan.
- b. Proses inventarisasi barang-barang yang ada disetiap ruangan seperti UKS, Labolatorium, dan lain sebagainya memiliki pencatatan sendiri yaitu melalui buku besar secara manual.
- c. Proses inventarisasi yang ada di perpustakaan memiliki prosedur yang berbeda yaitu menggunakan aplikasi online untuk pencatatan kode inventaris pada buku-buku yang ada di perpustakaan.

8) Prosedur Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 3 Kepanjen

- a. Proses pemeliharaan yang dilakukan ada yang bertahap dengan jangka waktu 3 bulan sekali yang berupa pemeliharaan terhadap AC, Sound dan lain sebagainya.
- b. Proses pemeliharaan yang dilakukan ada yang secara rutinan yaitu dengan jangka waktu setiap hari yang berupa pemeliharaan kebersihan tanaman, kebersihan ruang kelas, perawatan sarana berupa elektronik dan yang lain sebaginya.
- c. Pemeliharaan pada sarana bergerak seperti pada mobil operasional sekolah, dan ambulance juga dilakukan setiap hari oleh supir yang telah disediakan dan bertugas untuk merawat mobil dan mabulance tersebut.

9) Prosedur Penghapusan sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 3 Kepanjen

- a. Proses penghapusan dilakukan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan, yaitu melalui dinas pendidikan kabupaten yang akan mengirimkan tim penghapusan sarana pendidikan, namun karena prosedurnya yang cukup rumit maka penghapusan belom pernah dilakukan.
- b. Prosedur penghapusan pada uks, perpustakaan, dan labolatorium
 berbeda dengan prosedur penghapusan sarana dan prasarana

yangada disekolah. Karena, di uks penghapusan yang sering terjadi yaitu pada obat-obat yang sudah kadaluarsa dan harus segera dihancurkan, sedangkan untuk penghapusan pada buku tidak boleh untuk dibuang, dibakar, ditanam, dijual kembali, maupun diberikan kepada instansi lain, melainkan harus tetap disimpan dengan cara didistribusikan ke lemari-lemari kelas yang ada disekolah, dan digudang tempat penyimpanan bukubuku yang sudah lama dan tidak terpakai lagi.

5.1.1.2 Aktor Pelaksana Implementasi Kebijakan Pemenuhan Srana dan Prasarana sekolah di SMP Negeri3 Kepanjen

1) Komite Sekolah sebagai organisasi mitra sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan pendidikan di sekolah, kehadirannya tidak hanya sebagai stempel sekolah khususnya dalam memungut biaya dari wali murid siswa, namun lebih jauh komite sekolah harus dapat menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam melahikan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah serta dapat menciptakan suasana dan konidis transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah.

2) Wali murid juga berperan penting dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 3 Kepanjen selain komite sekolah , karena wali murid juga ikut berperan andil dalam sumbangan dana yang diberikan untuk pembangunan fasilitas sarana dan prasarana sekolah yang ada.

5.1.1.3 Kesesuaian dengan standar-standar sarana dan prasarana pendidikan sekolah yang ditetapkan dalam Permendiknas No 24 Tahun 2007

- Pendayagunaan sarana dan prasarana telah dituliskan dalam kebijakan Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana SMP/MTs yang menyatakan bahwa:
- "Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Dan setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan,ruang kelas, ruang pimpinan,ruang pendidik,ruang tata usaha, ruang perpustakaan,ruang laboraturium, ruang kantin, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan."
 - 2) SMP Negeri 3 Kepanjen yang sangat konsen terhadap sarana dan prasarana dalam rangka pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang bertujuan untuk memenhi sarana dan

prasarana yang ada di SMP Negeri 3 Kepanjen yang mengacu pada Permendiknas No 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana

3) SMP Negeri 3 Kepanjen sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Permendiknas No 24 Tahun 2007 tentang ruangan apa saja yang harus dimiliki oleh SMP/Mts

5.1.1.4 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah dalam Menunjang Pembelajaran Siswa

Pembelajaran adalah kegiatan mengelola lingkungan agar tejadi tindak belajar pada seseorang (sejumlah orang) secara efektif dan efisien. Pembelajaran adala suatu kombinasi yang tersusun melalui unsur-unsur manusiawi,material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengarui dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Manusia terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnya, misalnya tenaga laboraturoium. Material, meliputi buku-buku, pappan tulis, kapur,fotografi, slide dan film, audio. Fasilitas dan perlengkapan terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan audiio visual, juga computer. Prosedur, meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi, praktek,belajar, ujian dan sebagainya.

UUSPN No 20 Tahun 2003 menyatakan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreatifitas berfikir yang dapat meningkatkan kemampuan berfikir siswa serta dapat meningkatkan kemampuan mengkontruksi pengetahuan

baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran.

Siswa-Siswi SMPN 3 Kepanjen dengan adanya fasilitas sarana dan dilihat dari prestasi siswa kelas VII dan VIII yang setiap tahunnya nilai rapornya meningkat, dan untuk siswa-siswi kelas IX hasil UNBK pada tahun 2017 peringkat 10 di Kabupaten Malang, pada tahun 2018 peringkat 9 di Kabupaten Malang, dan pada tahun 2019 peringkat 8 di Kabupaten Malang. Tidak hanya dibidang akademik saja tetapi dalam bidang non akademik siswa-siswi juga mengukir prestasi salah satunya yaitu juara voli putra maupun putri , juara bola basket putra maupun putri serta juara sepakbola.

5.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan pemenuhan sarana dan prasarana dalam menunjang pembelajaran siswa di SMP Negeri 3 Kepanjen

5.1.2.1 Faktor Pendukung

1)Sumber Dana

Sumber dana ini masih saja menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana ini. Apabila dana yang diperoleh beberapa sumber ini dapat terpenuhi seutuhnya maka sarana dan prasarana yang akan diadakan dapat segera terbeli.

BRAWIJAYA

2) Adanya Koordinasi yang baik

Koordinasi yang baik dalam pelaksanaan Pemenuhan sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran ini sangat diperlukan,terlebih dalam pemenuhan sarana prasarana nya yang meliputi pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan. Koordinasi yang terjadi selain dari lingkup internal, juga dari lingkup eksternal. Lingkup internal yaitu berupa antara kepala koordinator setiap ruangan dengan waka maupun staff bagian sarana dan prasarana, antara guru dengan bagian sarana dan prasarana, maupun antara waka sarana dan prasarana dengan kepala sekolah. Untuk koordinasi lingkup eksternal yaitu antara wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana maupun staffnya, dengan pihak dinas pendidikan kabupaten malang.

5.1.2.2 Faktor Penghambat

1)Sumber Dana

Sumber dana juga merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana untuk menunjangpembelajaran. Pada proses pengadaan sarana dan prasarana hal yang terpenting adalah dana nya. Apabila dana yang digunakan dalam proses pengadaan yang berasal dari 3 sumber tersebut belum terkumpul semua dikarenakan ada siswa yang telat membayarkannya, maka proses pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dapat terhambat dan tidak dapat dilaksanakan. 2)Pelayanan yang lama

Pelayanan yang lama juga dapat menghambat pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana. Dari lingkup eksternal pelayanan yang lama disebabkan oleh

Pemerintah dinas pendidikan terkait dalam proses penghapusan. Sedangkan, pelayanan yang lama dirasakan juga oleh guruguru atau siwa yang meminta perbaikan atau sesuatu hal yang digunakan dalam menunjang proses pembelajaran.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis terhadap hasil penelitian tentang Implementasi kebijakan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 3 Kepanjen adalah sebagai berikut:

- 1. Waka Sarana dan Prasana dan tim agar bekerjasama dengan baik dan lebih melihat secara menyeluruh dalam pemenuhan sarana dan prasarana sekolah agar dapat membuat siswa siswi SMP Negeri 3 Kepanjen merasa nyaman dan dapat meningatkan pembelajaran mereka.
- Walaupun sudah sesuai dengan standar sarana prasarana sekolah yang ada dalam Permendiknas No 24 Tahun 2007, Pihak SMPN 3 Kepanjen harus bisa memanfaatkan lahan kosong dengan sebaik mungkin guna menunjang pembelajaran siswa dan bermanfaat bagi siswa-siswi yang ada di SMP Negeri 3 Kepanjen
- 3. Dalam pengadaan sarana dan prasarana untuk sekolah diharapkan pihak Waka sarana dan prasarana bersama tim untuk lebih memikirkan lagi apakah sarana dan prasarana tersebut bermanfaat bagi siswa, dan untuk pemeliharaan khususnya untuk kamar mandi siswi putri lebih diperhatikan

BRAWIJAYA

- lagi agar lebih bersih dan terjaga seperti kamar mandi guru maupun kamar mandi wali murid yang ada di dekat pos satpam SMP Negeri 3 Kepanjen
- 4. Sebaiknya dalam Perencanaan,Pengadaan,Inventarisasi,Pemeliharaan dan Pengahapusan dalam prosedur pemenuhan sarana dan prasarana sekolah komite sekolah dihadirkan dalam rapatnya sehingga komite sekolah tidak hanya tahu tentang hasilnya saja tetapi mengetahui prosesnya mengapa sarana dan prasarana itu harus dipenuhi atau diadakan.



DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal. 2016. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika.

Abdul Wahab, Solichin. 2015. Analisis Kebijakandari Formulasike Penyusunan.

Barnawi, 2017. *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Basilius. 2015. Manajemen Pendidikan di Sekolah. Yogyakarta: Media Akademi

Danim, Sudarwan. 2016. Visi Baru Manajemen Sekolah. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2001. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Dirjen pendidikan dasar dan menengah.

Departemen Agama Republik Indonesia. 2003. *Pedoman Manajemen Berbasis Sekolah.* Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam.

Dermawan, Deni. 2018. Konsep dasar Pembelajaran. Malang: ROSDA

Djamal, M. 2015. Paradigma Penelitian Kualitatitf. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fattah, Nanang. 2000. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Gunawan, Ary. 1996. *Administrasi Sekolah Administrasi pendidikan mikro*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Hardi, Kustini. 2009. Implementasi Konsep MBS di Sekolah. Jakarta: PT.

Gramedia.

Harsono. 2006. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Cendekia

Hermino, Agustinus. 2014. *Manajemen Kurikulum Berbasis Karakter konsep pendekatan dan aplikasi*. Bandung: Alfabeta.

Husamah. 2016. Belajar dan Pembelajaran. Malang: UMM Press

Indiahono, Dwiyanto. 2017. *KEBIJAKAN PUBLIK: BERBASIS DYNAMIC POLICYANALYSIS*. Yogyakarta: PENERBIT GAVA MEDIA

Indrawan, 2015. Pengantar Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah.

Yogyakarta: Deepublish

Kompri. 2014. Manajemen Sekolah teori dan praktik. Bandung: Alfabeta.

Kompas.com. Pentingnya Fasilitas Pendidikan yang memadai. Diakses pada 20 Desember 2018.

Kurniadin, Didin. 2016. *Manajemen Pendidikan Konsep dan prinsip pengelolaan pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Munadi, Muhammad, Barnawi. 2011. KEBIJAKAN PUBLIK DI BIDANG

PENDIDIKAN.Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA

Mulyasa. E. 2005. Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam menyukseskan MBS dan KBK. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Moleong, j, Lexy. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mulyono. 2008. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Mulyasa, E. 2004. *Manajemen berbasis sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Rosdakarya.

Nazir, Moh. 2014. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia

Neolaka, Amos. 2017. Landasan Pendidikan Dasar Pengenalan diri sendiri menuju perubahan hidup. Depok: K E N C A N A

Permendagri No. 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana pendidikan.

Prastowo, Andi. 2016. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

PurwantoErwanAgus, DyahRatihSulistyastuti. 2015. ImplementasiKebijakan

Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: PenerbitGava

Media

PurwantoErwanAgus, DyahRatihSulistyastuti. 2015. ImplementasiKebijakan

Publik: KonsepdanAplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: PenerbitGava

Media

Ramayulis. 2004. Ilmu Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Pesada

Riyanto, Yatim. 2009. Paradigma Baru Pembelajaran sebagai referensi bagi pendidik dalam implementasi pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Jakarta: KENCANA Prenada Media Group

Saihudin. 2018. *Manajemen Institusi Pendidikan*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.

SaifulSagala, 2008, AdministrasiPendidikanKontemporer, Bandung: Alfabeta

Sindonews.2017.Melaluihttps://www.googles.com/amp/s/m.sindonews.com/amp/ 3023308/sma-negeri-terbaik-di-indonesia-berdasarkan-prestasi-dankualitas-sekolahdiakses tanggal 20 Desember 2018.

Suryosubroto. 2004. Manajemen Pendidikan di sekolah. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sugiyono, 2016. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sutinah. 2006. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif*. Jakarta: Prenada Media Group

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Winarno, Budi. 2016. KebijakanPublik Era Globalisasi. Jakarta: PT. BUKU SERU



LAMPIRAN 1. Lampiran Pedoman Wawancara

INTERVIEW GUIDE

INTERVIEW GUIDE TERHADAP KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 3 KEPANJEN

- 1. Apa saja sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 3 Kepanjen?
- 2. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana di Sekolah SMPN 3 Kepanjen?
- 3. Adakah pembentukan panitia dalam pengelolaan pemenuhan sarana dan prasarana di SMPN 3 Kepanjen ?
- 4. Bagaimanakah koordinasi antara kepala sekolah dengan kepala bagian sarana dan prasarana di SMPN 3 Kepanjen ?
- 5. Bagaimana cara sekolah untuk melaksanakan pengawasan terhadap proses pengelolaan pemenuhan sarana dan prasarana di Sekolah SMPN 3 Kepanjen?
- 6. Darimana sumber dana dalam memenuhi sarana dan prasarana di sekolan SMPN 3 Kepanjen ini ?
- 7. Bagaimana menurut bapak/ibu terkait hubungan antara sarana dan prasarana dengan proses pembelajaran ?
- 8. Apa ada strategi khusus yang dilakukan dalam pemenuhan sarana dan prasarana di Sekolah SMPN 3 Kepanjen ini ?
- 9. Apa saja faktor pendukung dalam Implementasi kebijakan pemenuhan sarana dan prasarana di SMPN 3 Kepanjen ini ?

10. Apa saja faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemenuhan sarana dan prasaran di SMPN 3 Kepanjen ini?



INTERVIEW GUIDE

INTERVIEW GUIDE KEPADA GURU DI SEKOLAH SMP Negeri 3 Kepanjen:

- Sudah berapa lama bapak/ ibu guru bekerja sebagai guru di Sekolah SMPN 3 Kepanjen ini ?
- 2. Bagaimana perkembangan sarana dan prasarana yang ada di SMPN 3 Kepanjen ini ?
- 3. Adakah perbedaan antara sarana dan prasarana yang dahulu dengan yang sekarang ?
- 4. Apa sajakah sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pembelajaran?
- 5. Apakah sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini sudah memadahi untuk menunjang proses pembelajaran ?
- 6. Apakah sarana dan prasarana yang ada disekolah digunakan secara dapat menunjang proses pembelajaran siswa?
- 7. Bagaimana cara bapak/ibu guru dalam penggunaan media pembelajaran serta fasilitas sarana dan prasarana yang ada dalam proses pembelajaran ?
- 8. Bagaimana menurut bapak/ibu guru dengan adanya sarana dan prasarana yang ada saat ini, apakah dapat membantu mempermudah dalam proses pembelajaran atau malah memperhambat dalam proses pembelajaran ?
- 9. Dengan adanya sarana dan prasarana di sekolah ini faktor apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan proses pembelajaran ?

BRAWIJAY

INTERVIEW GUIDE

INTERVIEW GUIDE KEPADA SISWA DI SEKOLAH SMP Negeri 3 Kepanjen:

- Apakah fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Sekolah SMPN 3
 Kepanjen ini sudah memadahi ?
- 2. Apakah fasilitas yang ada di sekolah sudah menunjang dalam proses pembelajaran ?
- 3. Apakah dalam proses pembelajaran bapak/ ibu guru sudah menggunakan sarana dan prasarana dengan baik ?
- 4. Bagaimana menurut anda terkait fasilitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini ?
- 5. Dari yang pernah anda rasakan apakah ada perbaikan setiap tahunnya yang dilakukan oleh sekolah untuk sarana dan prasarana di sekolah ini ?
- 6. Apakah sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini sudah digunakan dengan baik dalam proses pembelajaran ?

INTERVIEW GUIDE

INTERVIEW GUIDE KEPADA KOMITE SEKOLAH DI SMP NEGERI 3 KEPANJEN :

- 1. Sudah berapa lama bapak/ibu sudah menjadi komite di SMP Negeri 3 Kepanjen ini?
- 2. Bagaimana cara kerja komite sekolah mengenai sarana dan prasarana di SMPN 3 Kepanjen?
- 3. Apakah komite sekolah ada tim khusus untuk menangani tentang pemenuhan sarana dan prasarana sekolah?
- 4. Apakah sarana dan prasarana pendidikan di SMPN 3 Kepanjen ini sudah memenuhi standar sekolah SMP/MTs yang telah ditetapkan oleh pemerintah?
- 5. Apakah terdapat perkembangan sarana dan prasarana yang ada di SMP 3 Kepanjen ini setiap tahunnya?
- 6. Bagaimana dengan dana untuk pemenuhan sarana dan prasarana di SMPN 3 Kepanjen ini?
- 7. Apakah sarana dan prasarana di SMP 3 Kepanjen ini mempengaruhi pembelajaran siswa?
- 8. Bagaimana prosedur untuk pemenuhan sarana dan prasarana di SMPN 3 Kepanjen ini?
- 9. Bagaimana Faktor pendukung dan Faktor Penghambat dalam pemenuhan sarana dan prasarana sekolah di SMPN 3 Kepanjen ini?



Gambar kelas yang menggunakan meja kursi lama dan yang baru Sumber Dokumentasi peneliti 2019



Gambar Halaman depan untuk parkir kendaraan tamu, wali murid dan abunmen siswa

Sumber Dokumentasi peneliti 2019



Gambar Mushalla SMP Negeri 3 Kepanjen Sumber Dokumentasi peneliti 2019



Gambar Lapangan Basket SMPN 3 Kepanjen Sumber Dokumentasi Peneliti 2019





Gambar Kantin Sehat di SMP Negeri 3 Kepanjen Sumber Dokumentasi Peneliti 2019



Gambar Lapangan Sepak Bola SMP Negeri 3 Kepanjen Sumber Dokumentasi Peneliti 2019



Gambar Taman Belakang SMP Negeri 3 Kepanjen Sumber Dokumentasi Peneliti 2019



Gambar Tempat Parkir Kendaraan Siswa SMPN 3 Kepanjen Sumber Dokumentasi Peneliti 2019



Gambar Gedung Kelas untuk siswa SMPN 3 Kepanjen Sumber Dokumentasi Peneliti 2019



Gambar Gedung Laboraturium SMPN 3 Kepanjen *Sumber Dokumentasi Peneliti 2019*



Gambar Tempat Sampah di SMPN 3 Kepanjen Sumber: Dokumentasi Peneliti 2019

BRAWIJAYA

PRESTASI SISWA NON AKADEMIK DI SMP NEGERI 3 KEPANJEN



JUARA 1 FUTSAL Se SMP TAHUN 2019 DAN JUARA 3 LOMBA VOLI PUTRI 2018



JUARA 1 BOLA BASKET PUTRI TAHUN 2018 DAN JUARA 1 BOLA VOLI PUTRI TAHUN 2019



JUARA 3 CERDAS CERMAT PUTRA TAHUN 2019 DAN JUARA 3 PIONEERING PUTRA TAHUN 2019



JUARA 3 PIONEERING PUTRI TAHUN 2019, JUARA 3 MUSIKALISASI PUISI PUTRI TAHUN 2019, DAN JUARA 1 TEKNOLOGI TEPAT GURU TAHUN 2019



JUARA 1 SEPAK BOLA PUTRA TAHUN 2018

